

KODE KLASIFIKASI	DESKRIPSI	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	PENGGUNA	UNIT PENANGGUNG JAWAB
			AKTIF	INAKTIF						
RC. PERENCANAAN										
01	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	1 Tahun setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	RPJMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	1 Tahun setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
03	Rencana strategis (Renstra)									
01	Renstra Kementerian Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis Kementerian BUMN yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).	Renstra Kementerian	1 Tahun setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	Renstra Unit Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis Unit eselon 1 Kementerian BUMN yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).	Renstra Unit Kerja	1 Tahun setelah Tidak Berlaku	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
04	Rencana Kerja									
01	Rencana Kerja Kementerian Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan unit kerja Kementerian BUMN terdiri dari hasil pembahasan dari pertemuan multilateral, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, pertemuan Trilateral (Bappenas, Dirjen Anggaran/DJA, KBUMN) dan Bilateral (Bappenas/DJA, KBUMN).	Rencana kerja Kementerian	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	Rencana Kerja Unit Kerja Arsip yang terkait Naskah-naskah yang berkaitan program dan kegiatan unit kerja eselon II yang merupakan penjabaran dari Renstra dalam satu tahun anggaran.	Rencana kerja unit kerja	1 tahun	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
05	Ketetapan Pagu IndikatifSementara Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penetapan pagu indikatif/semantara.	Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, RKAKL masing-masing unit kerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) perencanaan, RAB dan persetujuan Komisi VI DPR RI.	1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
06	Ketetapan Pagu Definitif Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penetapan pagu definitif	Surat Menteri Keuangan tentang alokasi pagu definitif, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/ Lembaga (KL) masing-masing unit kerja, KAK Perencanaan, Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan Persetujuan Komisi VI DPR RI.	1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
07	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Revisi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan proses persetujuan revisi anggaran terdiri dari DIPA APBN, DIPA APBN-P dan DIPA Revisi.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan proses persetujuan revisi anggaran terdiri dari DIPA APBN, DIPA APBN-P dan DIPA Revisi.	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
08	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) termasuk revisinya Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengisian aplikasi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari masing-masing unit kerja termasuk revisinya.	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) termasuk revisinya.	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
09	Penetapan Kinerja									
01	Penetapan Kinerja Menteri BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Penetapan Kinerja (PK) Kementerian BUMN.	PK Kementerian BUMN	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	Penetapan Kinerja Unit Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Penetapan Kinerja (PK) masing-masing unit kerja.	PK Unit Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
10	Pelaporan/Output Kinerja									
01	Laporan Pelaksanaan Program Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pelaksanaan program kerja.	Laporan Pelaksanaan Program Kerja triwulan, semester dan tahunan.	1 tahun	2 tahun	Musnah kecuali laporan tahunan Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan monitoring dan evaluasi program kerja.	Laporan Monitoring dan Evaluasi program Kerja baik bulanan, triwulan dan semester.	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
11	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan LAKIP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian dan Unit Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali LAKIP Kementerian	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
12	Penetapan Ukuran Kinerja									
01	Penetapan Ukuran Kinerja kementerian Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan indikator kinerja utama Kementerian BUMN.	Penetapan Ukuran Kinerja	1 Tahun setelah Tidak Berlaku	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	Penetapan Ukuran Kinerja Unit Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan indikator kinerja unit.	Penetapan Ukuran Kinerja	1 Tahun setelah Tidak Berlaku	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
13	Monitoring Kinerja									
01	Monitoring Kinerja Kementerian Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring kinerja Kementerian	Kinerja Kementerian	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	Monitoring Kinerja Unit Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring kinerja Unit Kerja	Kinerja Unit	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
14	Arsitektur dan Informasi Kinerja Kementerian BUMN dan unit kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan Arsitektur dan Informasi Kinerja Kementerian BUMN dan unit kerja.	Arsitektur dan Informasi Kinerja Kementerian BUMN dan unit kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah Kecuali Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
SM. SUMBER DAYA MANUSIA										
01	Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM)									
01	Analisis Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan data tentang suatu jabatan atau pekerjaan untuk menetapkan uraian jabatan atau pekerjaan.	Data Analis Jabatan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	Penetapan Kebutuhan SDM Naskah-naskah yang berkaitan dengan Arsip yang terkait penetapan kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Penetapan Kebutuhan SDM	2 tahun, setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
03	Formasi Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan persetujuan Formasi Pegawai ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Formasi Pegawai	2 tahun, setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi

02		Pendelagasan Wewenang										
01		Penetapan Pejabat Pih Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan Pejabat Pelaksana Harian.	Penetapan Pejabat Pih	1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
02		Penetapan Pejabat Pit Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan Pejabat Pelaksana Tugas.	Penetapan Pejabat Pit	1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
03		Pengadaan SDM ASN (PNS)										
01		Penerimaan SDM Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan, meliputi seleksi administrasi, pemanggilan peserta test, pelaksanaan ujian tertulis, dan wawancara.	Pengumuman, soal ujian, daftar hadir, berita acara.	2 tahun, setelah diangkat ASN	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
02		Penetapan Pengumuman Kelulusan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengadaaan, meliputi pengumuman setiap tahapan seleksi/ test dan kelulusan akhir.	Penetapan Pengumuman Kelulusan	2 tahun, setelah diangkat ASN	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
03		Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan Kelengkapan Penetapan NIP	Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP	-	-	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon II	Memiki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
04		Nota Usul Pengangkatan CASN menjadi ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan pengangkatan CASN menjadi ASN.	Nota Usul Pengangkatan CASN menjadi ASN	1 tahun, setelah Surat Keputusan (SK) ditetapkan	2 tahun	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
05		Surat Keputusan CASN/ASN Kolektif Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan CASN/ASN Kolektif	Surat Keputusan CASN/ASN Kolektif	2 tahun, setelah Petikan SK ditetapkan	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
06		Berkas Lamaran yang Tidak Diterima Naskah-naskah yang berkaitan dengan amaran pendaftar yang tidak diterima	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima	1 tahun, setelah lamaran berakhir	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
04		Pengadaan SDM ASN (non PNS) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan Pegawai ASN Non PNS/PPNPN dan Pegawai Alih Cakupan dari BUMN lainnya	Pengadaan Pengadaan Pegawai non PNS dan Alih Pengetahuan	1 tahun, setelah tahun anggaran berakhir	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
05		Pengadaan Jabatan Pimpinan Tinggi										
01		Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya,	SK pembentukan TIM, Pengumuman, Panitia Seleksi, Daftar Hadir, Bahan Presentasi, Risalah, Surat Pengajuan Calon ke Presiden, Laporan kepada Komisi ASN.	2 tahun, setelah pelantikan	2 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
02		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	SK pembentukan TIM, Pengumuman, Panitia Seleksi, Daftar Hadir, Bahan Presentasi, Risalah, Surat Pengajuan Calon ke Menteri, Laporan kepada Komisi ASN.	2 tahun, setelah pelantikan	2 tahun	Musnah kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Musnah kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
03		Berkas Lamaran yang Tidak Diterima Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas lamaran yang tidak diterima.	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima	1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
06		Pengembangan Kompetensi SDM										
01		Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penguasaan Diklat, Kursus pegawai.	Surat Perintah, Surat Tugas, Laporan Pelaksanaan Diklat, Sertifikat Diklat.	1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah kecuali sertifikat masuk berkas perseorangan	Terbuka	Eselon III	Memiki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
02		Tugas Belajar, Izin Belajar Naskah-naskah yang berkaitan dengan penguasaan Tugas Belajar, Izin Belajar pegawai	Surat Tugas Belajar, Surat Izin Belajar, Ijazah	1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah kecuali ijazah masuk berkas perseorangan	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
03		Ujian Dinas Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan penugasan pegawai Ujian Dinas Pegawai.	Surat Perintah, Surat Tugas, Surat Keterangan Lulus	1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah kecuali Surat Keterangan Lulus masuk berkas perseorangan	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
04		Aesmen Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan asesmen pegawai.	Surat Perintah, Surat Tugas, Laporan Hasil Aesmen.	3 Tahun	2 Tahun	Musnah kecuali laporan hasil asesmen Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Esselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
07		Pembinaan SDM								Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses		
01		Disiplin Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan disiplin pegawai.	Daftar Hadir dan Rekapitulasi Daftar Hadir	1 tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementrian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
02		Penilaian Prestasi Kerja (PPK) ASN PNS Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja ASN (PNS)	Penilaian Prestasi Kerja (PPK)	1 tahun, setelah penilaian ditetapkan	3 tahun	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Esselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementrian BUMN	Penguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
03		Penilaian Prestasi Kerja (PPK) ASN Non PNS/Magang BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Atasan ASN Non PNS terhadap sasaran kerja dan perilaku kerja ASN Non PNS/Magang BUMN.	Laporan Prestasi Kerja	1 tahun, setelah penilaian ditetapkan	3 tahun	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementrian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
04		Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usulan yang berisi hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan.	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit, Penetapan Angka Kredit	1 tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota din SK Masukan Angka Kredit masuk berkas perseorangan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
05		Berkes Hukumkan DisplinhPemberhentian Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumentasi proses penjutaahan hukuman disiplin PNS dimulai dari dokumen pemanggilan, berita acara pemeriksaan dan surat keputusan penjutaahan hukuman disiplin.	Berkas Hukumkan DisplinhPemberhentian	1 tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah, kecuali BAP dan SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
06		Penghargaan dan Tanda Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.	Penghargaan dan Tanda Jasa	2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Panguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
08		Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai.	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	1 tahun, setelah memperoleh keputusan tetap	5 tahun	Dirilai kembali, kecuali SK Penetapan masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
09		Mutasi SDM Alih Status, pindah instansi, diperbantukan, dipekerjakan, Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala perubahan mengenai seseorang ASN seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemusnahan, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain.	Alih Status, pindah instansi, diperbantukan, dipekerjakan, nota persetujuan/perimbangan Kepala BKN.	1 tahun, setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota din SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	

02	Rotasi Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala perubahan mengenai seseorang ASN seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pensiunan, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain.	SK Rotasi Kerja	1 tahun, setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseroan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
03	Penyesuaian Masa Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses untuk menghitung masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok.	SK Penyesuaian Masa Kerja	1 tahun, setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseroan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
04	Mutasi Keluarga Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala perubahan mengenai segala perubahan mutasi keluarga ASN.	Surat Izin Pemikahan/Perceaan, Surat Pendakan Izin, Akta Nikah/Cerai, Akta Kelahiran Anak, Surat Keterangan Meninggal Dunia	1 tahun, setelah penetapan	-	Masuk berkas perseroan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
05	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usulan yang berisi daftar nama pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk mendapatkan dapat diangkat/diberhentikan dalam jabatan struktural tertentu.	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseroan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
06	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usulan yang berisi daftar nama pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk mendapatkan dapat diangkat/diberhentikan dalam jabatan fungsional tertentu.	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseroan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
07	Usul Kenaikan Pangkat/Golongan Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usulan yang berisi daftar nama pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk mendapatkan kenaikan pangkat pada periode tertentu.	Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseroan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
08	Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usulan yang berisi daftar nama pegawai yang akan dilakukan perubahan data dasar/status/ kedudukan hukumnya.	Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Surat Persetujuan dan SK masuk berkas perseroan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
09	Berkas Baperjakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumentasi dalam memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian di lingkungan kementerian BUMN.	Berkas Baperjakat	1 tahun setelah SK ditetapkan	5 tahun	Musnah kecuali pejabat eselon I Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
10	Pelantikan Pejabat Struktural/JFU Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengesahan pejabat dalam jabatan struktural/umum yang telah ditetapkan melalui surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian	Pelantikan Pejabat Struktural/JFU	Masuk Personal File	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
01	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas/Surat Izin Naskah-naskah yang berkaitan dengan perintah/arahan/izin yang diberikan oleh pihak atasan atau instansi kepada bawahan atau anggota instansi agar melaksanakan dinas-tugas/izin tertentu yang diberikan atasan.	Perintah Dinas/Surat Tugas/Surat Izin	2 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseroan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	Cuti Besar Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian cuti yang dapat diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya enam tahun secara terus-menerus.	Cuti Besar	1 tahun setelah SK ditetapkan	-	Masuk Berkas perseroan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
03	Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan izin cuti pegawai untuk meninggalkan pekerjaan karena alasan yang dapat diterima (sakit, bersalin, menjalakan cuti tahunan)	Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti tahunan	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
04	Cuti Alasan Penting Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian cuti yang diberikan kepada Pegawai karena adanya alasan yang penting.	Cuti Alasan Penting	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
05	Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian cuti yang diberikan kepada pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus dikarenakan alasan-alasan pribadi yang penting dan mendasak.	Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)	3 tahun setelah pelaksanaan	-	Masuk berkas perseroan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
06	Dokumentasi Identitas Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendataan identitas pribadi PNS dan keluarganya.	usul penetapan karpeng/KPE/Karis/Kersu, Keanggotaan Organisasi profesi/kedinasan, Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KPA), Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kependudukan (DUK), LHKPN, LHKASN.	1 tahun setelah penetapan	-	Masuk berkas perseroan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
11	Kesejahteraan Pegawai							Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses		
01	Gaji, Tunjangan Uang Makan, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Suami/Istri Naskah-naskah yang berkaitan dengan belanja gaji pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil.	Gaji	2 tahun	8 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
02	Tunjangan Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan belanja tunjangan kinerja pegawai.	Tunjangan Kinerja	2 tahun	8 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
03	Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan dengan layanan pemeliharaan kesehatan pegawai seperti proses pemeriksaan kesehatan berkala dan medical record.	Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	2 Tahun	1 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
04	Registrasi Surat Keterangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses registrasi surat keterangan PNS Non PNS.	Registrasi Surat Keterangan	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
05	Layanan Asuransi Pegawai/BPJS Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada PNS dalam program jaminan kesehatan bagi PNS Non PNS.	Layanan Asuransi Pegawai/BPJS	2 tahun	-	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
06	Layanan Tabungan Perumahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan bantuan dana dari hasil pemupukan yang tidak harus dikembalikan untuk digunakan oleh PNS dalam memenuhi kebutuhan uang muka pembelian rumah sejahtera melalui kredit/pembiayaan pembelian rumah atau kredit/ pembiayaan membangun rumah diatas tanah sendiri, termasuk untuk biaya-biaya terkait kredit/pembiayaan rumah atau yang dipersyaratkan oleh bank.	Layanan Tabungan Perumahan	2 tahun	-	Permanen sampai pensiun	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi

07	Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan kepada keluarga/ahli waris PNS yang meninggal karena dinas yang terdiri atas Gaji Terusan, Jaminan Kematian, Asuransi Kematian/Askem (THT), Asuransi Dwiguna (THT), Pensun Janda/Duda/Anak, Pengembalian Uang Taperum PNS.	Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas	2 tahun	-	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
08	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	2 tahun	-	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
09	Layanan Olahraga dan Rekreasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada PNS dalam bentuk kesempatan/fasilitas untuk berolahraga dan rekreasi yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Layanan Olahraga dan Rekreasi	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
10	Layanan Kesejahteraan Lain (fasilitas kredit) Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada PNS untuk memperoleh surat keterangan dari instansi dalam rangka mendapatkan fasilitas dari pihak tertentu.	Layanan Kesejahteraan Lain (fasilitas kredit)	2 tahun	-	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
12	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	1 tahun setelah memperoleh keputusan yang bersifat tetap	2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
13	Penugasan Pegawai Kementerian Naskah-naskah yang berkaitan dengan penugasan pegawai Kementerian BUMN sebagai Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas/Organ Dewan Komisaris di BUMN/Anak Perusahaan BUMN.	Penugasan Pegawai Kementerian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah kecuali penugasan untuk Direksi/ Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
14	Pemberhentian Pegawai/Pensun									
01	Pemberhentian dengan Hormat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan hormat.	SK Pemberhentian dan SK Pensun.	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	Pemberhentian dengan tidak Hormat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat.	SK Pemberhentian.	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
03	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensun Pegawai/Jandanya/Dudanya & PNS yang meninggal Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses usulan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/ jandanya/ dudanya dan ASN yang meninggal.	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensun Pegawai/Jandanya/Dudanya & PNS yang meninggal	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
15	Magang Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan Magang SMA/SMK atau mahasiswa atau pegawai dari perusahaan lain	Magang	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
16	Personal File/Office Automation									
01	Lamaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas lamaran	Lamaran	1 tahun setelah berhenti/pensun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	Nota persetujuan/perimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Nota persetujuan/perimbangan Kepala BKN.	Nota persetujuan/perimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)	1 tahun setelah berhenti/pensun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
03	Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS/CASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pengangkatan CPNS/CASN.	Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS/CASN	1 tahun setelah berhenti/pensun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
04	Hasil pengujian kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil pengujian kesehatan.	Hasil pengujian kesehatan	1 tahun setelah berhenti/pensun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
05	Copy kartu pegawai (KARPEG) Naskah-naskah yang berkaitan dengan copy KARPEG.	Copy kartu pegawai (KARPEG)	1 tahun setelah berhenti/pensun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
06	SK kenaikan gaji berkala Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK kenaikan gaji berkala.	SK kenaikan gaji berkala	1 tahun setelah berhenti/pensun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi

07	Surat pernyataan melaksanakan tugas/menduduki jabatan/surat pernyataan pelantikan Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas/menduduki jabatan/surat pernyataan pelantikan.	Surat pernyataan melaksanakan tugas/menduduki jabatan/surat pernyataan pelantikan	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
08	SK pengangkatan dalam atau pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pengangkatan dalam atau pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional.	SK pengangkatan dalam atau pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
09	SK perpindahan wilayah kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK perpindahan wilayah kerja.	SK perpindahan wilayah kerja	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
10	SK perpindahan antar instansi Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK perpindahan antar instansi.	SK perpindahan antar instansi	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
11	SK peninjauan masa kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK peninjauan masa kerja.	SK peninjauan masa kerja	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
12	SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK CTLN.	SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN)	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
13	Berita acara pemeriksaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan berita acara pemeriksaan.	Berita acara pemeriksaan	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
14	SK hukuman jabatan/hukuman disiplin PNS/ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK hukuman jabatan/hukuman disiplin PNS/ASN.	SK hukuman jabatan/hukuman disiplin PNS/ASN	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
15	SK perbantuan kepala daerah otonom/instansi lain Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK perbantuan kepala daerah otonom/instansi lain.	SK perbantuan kepala daerah otonom/instansi lain	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
16	SK penarikan kembali dari perbantuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK penarikan kembali dari perbantuan.	SK penarikan kembali dari perbantuan	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
17	SK pemberian uang tunggu Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pemberian uang tunggu.	SK pemberian uang tunggu	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
18	SK pemberhentian sebagai PNS/ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pemberhentian sebagai PNS/ASN.	SK pemberhentian sebagai PNS/ASN	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi

19	SK pemberhentian sementara Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pemberhentian sementara.	SK pemberhentian sementara	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
20	SK pengangkatan/pemberhentian sebagai Pejabat Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pengangkatan/pemberhentian sebagai Pejabat Negara.	SK pengangkatan/pemberhentian sebagai Pejabat Negara	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
21	SK pembebasan dari jabatan organik karena diangkat sebagai pejabat negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pembebasan dari jabatan organik karena diangkat sebagai pejabat negara.	SK pembebasan dari jabatan organik karena diangkat sebagai pejabat negara	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
22	SK pengalihan PNS/ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pengalihan PNS/ASN.	SK pengalihan PNS/ASN	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
23	Surat keterangan pernyataan hilang Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan pernyataan hilang.	Surat keterangan pernyataan hilang	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
24	Surat kembalinya PNS yang dinyatakan hilang Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat kembalinya PNS yang dinyatakan hilang.	Surat kembalinya PNS yang dinyatakan hilang	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
25	SK penggantian nama Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK penggantian nama.	SK penggantian nama	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
26	Surat perbaikan tanggal tahun kelahiran PNS/ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat perbaikan tanggal tahun kelahiran PNS/ASN.	Surat perbaikan tanggal tahun kelahiran PNS/ASN	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
27	Isian formulir Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) Naskah-naskah yang berkaitan dengan isian formulir PUPNS.	Isian formulir Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS)	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
28	Berita acara pengambilan sumpah Naskah-naskah yang berkaitan dengan berita acara pengambilan sumpah.	Berita acara pengambilan sumpah	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
29	Penetapan angka kredit Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan angka kredit.	Penetapan angka kredit	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
30	Surat tugas/izin belajar dalam/luar negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat tugas/izin belajar dalam/luar negeri.	Surat tugas/izin belajar dalam/luar negeri	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi

31	SK kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.	SK kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
32	Surat izin menjadi anggota Partai Politik (Parpol)/Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat izin menjadi anggota Parpol/Ormas/LSM.		1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
33	Surat pencabutan izin menjadi anggota Parpol Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat pencabutan izin menjadi anggota Parpol.	Surat pencabutan izin menjadi anggota Parpol	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
34	Surat keterangan meninggal dunia/hilang Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan meninggal dunia/hilang.	Surat keterangan meninggal dunia/hilang	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
35	Surat keterangan mutasi keluarga Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan mutasi keluarga.	Surat keterangan mutasi keluarga	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
36	Surat keterangan peningkatan pendidikan Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan peningkatan pendidikan.	Surat keterangan peningkatan pendidikan Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan peningkatan pendidikan.	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
37	Surat keterangan hasil penelitian khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan hasil penelitian khusus.	Surat keterangan hasil penelitian khusus	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
38	Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala.	Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
39	Surat izin berpergian ke luar negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat izin berpergian ke luar negeri.	Surat izin berpergian ke luar negeri	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
40	Kartu induk PNS/ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kartu induk PNS/ASN.	Kartu induk PNS/ASN	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
41	SK penempatan/penarikan pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK penempatan/penarikan pegawai.	SK penempatan/penarikan pegawai	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
42	SK penarikan kembali dari pertantuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK penarikan kembali dari pertantuan.	SK penarikan kembali dari pertantuan	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi

43	SK pertimbangan status PNS/ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pertimbangan status PNS/ASN.	SK pertimbangan status PNS/ASN	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
44	SK persetujuan/pengusutan kembali cuti di luar tanggungan negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK persetujuan/pengusutan kembali CTLN.	SK persetujuan/pengusutan kembali cuti di luar tanggungan negara	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
45	Surat keterangan pengunduran diri/diberhentikan sebagai PNS/ASN karena menjadi pengurus/anggota Parpol Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan pengunduran diri/diberhentikan sebagai PNS/ASN, karena menjadi pengurus/anggota Parpol.	Surat keterangan pengunduran diri/diberhentikan sebagai PNS/ASN karena menjadi pengurus/anggota Parpol	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
46	SK pensiun Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pensiun.	SK pensiun	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
17	Berkas Menteri/Wakil Menteri Sebagai Pejabat Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan Berkas Menteri/Wakil Menteri sebagai Pejabat Negara	Berkas Menteri/Wakil Menteri sebagai Pejabat Negara	1 Tahun tidak menjabat	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
OR.ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI										
01	Organisasi									
01	Struktur Organisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Menteri mengenai Rancangan Perpres tentang Kementerian BUMN Surat Menteri tentang Rancangan Permen tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian (konsep Permen dan Naskah Akademik/Paparan), Persetujuan Menpan atas Konsep Peraturan Presiden	Penetapan Struktur Organisasi	1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Sekretariat Kementerian BUMN
02	Evaluasi Organisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi organisasi Kementerian BUMN	Laporan hasil evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN		Sekretariat Kementerian BUMN
03	Penetapan Portofolio BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keputusan Menteri/atas Nama Menteri terkait penetapan portofolio BUMN	Penetapan Portofolio BUMN	1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Sekretariat Kementerian BUMN
02	Informasi Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, jabatan fungsional umum.	SK Informasi Jabatan	1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Musnah kecuali Penetapan Informasi Jabatan Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Sekretariat Kementerian BUMN
03	Evaluasi Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum, dan Peraturan Menteri BUMN tentang Grading.	Peraturan Menteri Evaluasi Jabatan	1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Musnah kecuali Peraturan Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Sekretariat Kementerian BUMN
04	Analisis Beban Kerja (ABK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum, dan Surat Keputusan tentang Analisis Beban Kerja (ABK).	Analisis Beban Kerja (ABK)	1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Musnah kecuali Penetapan Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Sekretariat Kementerian BUMN
05	Penetapan/Penyelarsan SOP Naskah-naskah yang berkaitan dengan Usulan SOP Unit, Pembahasan SOP, Pengesahan SOP, Mekanisme Kerja/Tata hubungan kerja, dan Evaluasi atas Implementasi SOP.	SOP	1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Musnah kecuali Penetapan Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Sekretariat Kementerian BUMN
06	Reformasi Birokrasi									
01	Pelaksanaan Program RB Naskah-naskah yang berkaitan dengan Road Map RB, Program Tahunan RB, SK Tim RB, ND, Risalah Rapat, dan Laporan Pelaksanaan Program dan Monitoring RB.	Road Map Reformasi Birokrasi, Pelaksanaan Program RB	1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Musnah kecuali Penetapan Kebijakan Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Sekretariat Kementerian BUMN
02	PENILAIAN PMPRB Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi.	PMPRB	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Sekretariat Kementerian BUMN
UM. UMUM										
01	Perencanaan dan Realisasi Pengadaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen RUP (Rancangan Umum Pengadaan) rencana pengadaan dalam satu tahun ke depan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan daftar realisasi pengadaan	Perencanaan dan Realisasi Pengadaan	2 Tahun	8 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
02	Pengadaan Barang dan Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pengadaan barang dan jasa	Nota permintaan barang dan jasa dari PPK kepada kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang merupakan dokumen klasifikasi awal, Rancangan Kontrak, Undangan, Notulen, Daftar Hadir terkait pengadaan, Dokumen Kualifikasi, Dokumen Pemilihan, Dokumen Penawaran yang disubmit oleh calon penyedia, dokumen pengadaan yang memuat tentang syarat-	2 Tahun	8 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
03	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)									
01	Penatausahaan Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penetapan Status Penggunaan (PSP), Penggunaan Sementara Gedung dan Inventarisasi, dokumen usulan penetapan penggunaan barang, dokumen penetapan penggunaan barang, Daftar Barang Milik Negara/Buku Inventaris, Berita Acara Inventarisasi BMN, Dokumen Laporan BMN, Dokumen Laporan Persediaan, Perjanjian Penggunaan Sementara, Usulan Penggunaan Sementara	Penatausahaan Barang Milik Negara	2 tahun	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas

02	Pemanfaatan BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendayagunaan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan yang terdiri dari Pemohonan Pemanfaatan oleh Pihak Ekstern, Usulan Pemanfaatan, Persetujuan Pemanfaatan, Perjanjian Pemanfaatan, BAST Pemanfaatan, Addendum Perjanjian Pemanfaatan, Laporan Hasil Pemanfaatan	Pemanfaatan BMN	1 Tahun setelah Perjanjian Berakhir	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
03	Pemindahtanganan/Penghapusan Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemindahtanganan baik berupa penghapusan, hibah maupun pemenuhan	Usulan Pemindahtanganan dan Penghapusan, Dokumen Pembentukan Tim Penghapusan, Berita Acara Penetapan Limit, Persetujuan Pemindahtanganan, Rasail Lelang, Berita Acara Serah Terima (BAST) Pemindahtanganan, Keputusan Penghapusan, Laporan Lelang	2 Tahun	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
04	Monitoring Naskah-naskah yang berkaitan dengan tagihan atas penggunaan listrik dan air oleh tenant maupun tagihan atas sewa ruangan	Rencana / Target PNPB, Rekapitulasi Realisasi PNPB, Laporan Realisasi PNPB, Surat Tagihan atas Pemanfaatan, Bukti Pembayaran atas Pemanfaatan.	1 Tahun setelah Perjanjian Berakhir	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
05	Distribusi Barang Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pendistribusian BMN kepada unit-unit kerja (BAST, BASTU)	Surat Permintaan/Bon Permintaan, Rekapitulasi Distribusi, Berita Acara Pinjam Pakai, Daftar Inventaris Ruangan/Daftar Inventaris Lainnya, Kartu Inventaris Barang	2 tahun setelah audit	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
06	Pengelolaan Gudang (nota penyampaian dan daftar barang rusak) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan daftar barang rusak yang didalamnya terdapat berkas form penarikan Barang Milik Negara.	Pengelolaan Gudang (nota penyampaian dan daftar barang rusak)	2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
04	Pengamanan Aset Tanah dan Gedung Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamanan Sertifikat Tanah dan Gedung, Bukti penilaian tanah dan gedung	Sertifikat Tanah dan Gedung, Bukti penilaian tanah dan gedung	Selama aset Masih Dimiliki	1 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
05	Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan gedung berupa laporan pengelola gedung maupun notulen	Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung	2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
06	Penyediaan Ruang Rapat Naskah-naskah yang berkaitan dengan permohonan penjaminan ruang rapat serta jadwalnya	Penyediaan Ruang Rapat	2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
07	Pelayanan Jasa Listrik, Telepon dan Air Naskah-naskah yang berkaitan dengan tagihan atas pemakaian listrik, telepon, air serta bukti pembayarannya	Pelayanan Jasa Listrik, Telepon dan Air	2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
08	Penyediaan Konsumsi Rapat dan Akomodasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan Konsumsi rapat serta akomodasi berupa surat permohonan konsumsi, undangan rapat, absensi hadir, serta kwitansi pembayaran.	Penyediaan Konsumsi Rapat dan Akomodasi	2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
09	Penggunaan Kendaraan Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan penggunaan Bahan bakar, perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas, penjaminan kendaraan dan laporan kerusakan kendaraan dinas.	laporan penggunaan Bahan bakar, perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas, penjaminan kendaraan dan laporan kerusakan kendaraan dinas.	2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
10	Layanan Keamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pengamanan termasuk parkir dan penerimaan tamu	Buku formulir tamu, kartu parkir, kartu akses	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
11	Layanan Rumah Tangga Lainnya (ID Card, Infocus) Naskah-naskah yang berkaitan dengan peminjaman peralatan seperti infocus atau laptop, serta arsip permohonan pembuatan ID Card dan berita acara serah terimanya	Layanan Rumah Tangga Lainnya (ID Card, infocus)	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
12	Layanan Pakailan Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan pakaian dinas yang didalamnya terdapat berkas ukuran pegawai.	Daftar ukuran pakaian dinas pegawai	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
TU. TATA USAHA										
01	Administrasi Persuratan									
01	Buku agenda (analog atau digital) surat masuk dan surat keluar Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengagendaan surat masuk dan surat keluar.	Buku Agenda surat	2 tahun	3 tahun	dinilai kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
02	Buku ekspedisi/tanda terima surat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi persuratan	Buku Ekspedisi	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
02	Pengelolaan Arsip Dinamis									
01	Penyusunan Sistem Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sistem kearsipan dinamis meliputi petunjuk pelaksanaan kearsipan dan persetujuan JRA.	SOP, Peraturan Menteri, SK	Selama masih berlaku	2 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
02	Pembinaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kearsipan dinamis meliputi bimbingan teknis kearsipan, apresiasi/sosialisasi/ penyuluhan, supervisi kearsipan, penilaian jabatan fungsional arsiparis, lomba terbit arsip.	Materi Pembinaan dsb	Selama masih berlaku	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
03	Monitoring Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring pengelolaan arsip dinamis di lingkungan unit kerja kementerian BUMN.	Laporan Hasil Monitoring	Selama masih berlaku	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
03	Pengelolaan Arsip Inaktif									
01	Penataan, Penyimpanan, Pemeliharaan dan Pengolahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan arsip inaktif mulai dari penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan.	Daftar arsip inaktif	2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
02	Peminjaman Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peminjaman arsip inaktif di record center	Buku peminjaman/ formulir peminjaman	2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
04	Penyusutan Arsip									
01	Pemindahan Arsip Inaktif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip	Berita acara pemindahan dan daftar arsip yang dipindahkan	Selama masih berlaku	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
02	Pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip	daftar arsip usul musnah, berita acara pemusnahan, SK tim pemusnahan arsip, rekomendasi/permimbangan pemusnahan arsip, dan surat keputusan pemusnahan.	2 tahun	3 tahun	Permanen kecuali fisik arsip musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
03	Penyerahan Arsip Statis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip	Daftar arsip yang diserahkan, berita acara serah terima arsip	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas

05		Perpustakaan dan Dokumentasi										
01		Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan koleksi dan pengolahan bahan pustaka perpustakaan Kementerian BUMN	Buku Induk Koleksi, Daftar buku dalam pemesanan, Daftar buku dan permintaan, Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah, Lembar kerja pengolahan shelf list/ Jajaran Kartu Utama (master list), Daftar tambahan Buku (Asseson list).	1 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Musnah kecuali buku induk koleksi Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas	
02		Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi Data Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan jasa dan informasi data yang diberikan perpustakaan Kementerian BUMN	Daftar tamu/peminjam, buku peminjaman, kartu peminjaman dan inventaris buku, data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka dan pemeliharaan, Bedah buku.	1 Tahun	1 Tahun	musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas	
03		Pemeliharaan Bahan Pustaka Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan bahan pustaka di lingkungan Kementerian BUMN	Laporan kondisi bahan pustaka dan repografi bahan pustaka	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas	
04		Pembinaan Perpustakaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan perpustakaan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pengembangan SDM, pengembangan sarana dan prasarana, kerjasama dan jaringan perpustakaan, pengembangan minat baca.	Laporan kegiatan pembinaan	1 tahun	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas	
KU. KEUANGAN												
01		Pelaksanaan, Penatuausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan dari Kementerian Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Internal Kementerian BUMN terkait Pelaksanaan, Penatuausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	Kebijakan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Keuangan Negara, Surat dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran	2 Tahun setelah KPA tidak menjabat	4 Tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas	
02		Pendapatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Realisasi Pendapatan	Surat Setoran Pajak (SSP) dan Bukti Setornya, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Setornya, Surat Setor Bea dan Cukai (SSBC), Bukti setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengembalian Belanja, Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank dsb.	2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban APBN disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas	
03		Belanja/Pengeluaran Anggaran										
01		Dokumen Pembayaran Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pengeluaran baik yang berupa petunjuk pelaksanaan/mekameisme pengelolaan DIPA APBN Rutin dan PMN sampai dengan semua berkas pengajuan pencairan dana sampai terbitnya surat perintah pencairan dana (SP2D)	Pengajuan kebutuhan penarikan kas, bukti bukti tagihan dari pihak ketiga, surat permintaan pembayaran (SPP) L.S., surat perintah pencairan dana (SP2D) L.S. Pencairan atas DIPA Penyeritaan Modal Negara (PMN)	2 tahun setelah UU APBN disahkan	5 tahun	Dinilai kembali kecuali Pencairan berkaitan dengan PMN Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas	
02		Uang Persediaan (UP)/Tambahhan UP Asrp yang berkaitan dengan belanja yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran menggunakan uang persediaan yang dikelolanya.	Bukti bukti tagihan dari pihak ketiga, surat permintaan pembayaran (SPP) GU, surat perintah membayar (SPM) GU, surat perintah pencairan dana (SP2D) GU	2 tahun setelah UU APBN disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas	
03		Pembukuan Perbendaharaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembukuan Bendahara Pengeluaran.	Pembukuan Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara, Buku Kas Umum, Tunjangan Kinerja, Bukti Potong/SPT (PPH 21, PPH 22, PPH 23)	2 tahun setelah UU APBN disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas	
04		Dokumen Akuntansi Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pencatatan transaksi penggunaan anggaran	Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium Kartu Gaji Bukti Setor Iuran/Kontribusi Pemerintah RI kepada Badan/Organisasi Internasional Berita Acara Pemeriksaan Kas Kas/Registor Penutupan Kas Arsip Data Komputer (ADK) Berita Acara Rekonsiliasi Antara Saluran Kerja dan KPPN	2 tahun setelah UU APBN disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas	
05		Laporan Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Kementerian BUMN.	Laporan Keuangan Realisasi APBN (BA. 041) dan Laporan Keuangan PMN (BA. 999.03) terdiri dari : Neraca Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan/Cat K)	2 tahun setelah UU APBN disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas	
04		Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara								Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses		
01		Tuntutan Perbendaharaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tuntutan atas pengeloa perbendaharaan	Tuntutan Perbendaharaan	2 tahun setelah tagihan tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi dilunasi	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Permanen	Terbatas	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas	
02		Tuntutan Ganti Rugi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengenaan tuntutan ganti rugi	Tuntutan Ganti Rugi	2 tahun setelah tagihan tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi dilunasi	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Permanen	Terbatas	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas	
05		Laporan Monitoring dan Evaluasi anggaran Asrp yang berkaitan dengan kegiatan laporan monitoring dan evaluasi anggaran	Laporan monitoring dan evaluasi	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas	
HM. HUBUNGAN MASYARAKAT												
01		Hubungan dengan media massa Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerbitan artikel, bulletin, press conferences, dokumentasi audiovisual, pembaruan informasi website, media social dan lainnya.	Artikel, bulletin, press conferences, dokumentasi audiovisual, pembaruan informasi website, media social dan klipng.	1 tahun	2 tahun	Musnah Kecuali Dokumentasi Kegiatan Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas	
02		Pameran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pameran, festival, sayembara dsb.	Laporan pelaksanaan pameran.	1 tahun	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas	
03		Hubungan antar Lembaga dan Masyarakat										
01		Hubungan dengan DPR/DPD/MPR Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat pimpinan dengan DPR/DPD/MPR baik Hearing/Rapat Kerja/Koordinasi DPR.	Undangan, Surat Dinas, Daftar Pertanyaan DPR, Bahan presentasi/Jawaban atas pertanyaan DPR.	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas	
02		Kunjungan Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kunjungan kerja DPR bersama pimpinan.	Laporan Kunjungan Kerja.	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas	
03		Hubungan Dengan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar instansi baik pusat maupun daerah	Surat surat yang terkait dengan pelaksanaan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali isu strategis Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN		Biro Umum dan Humas	
04		Hubungan dengan organisasi sosial /LSM Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan organisasi kemasyarakatan	Surat surat yang terkait dengan pelaksanaan	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN		Biro Umum dan Humas	
05		Hubungan dengan BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga dengan BUMN	Surat surat yang terkait dengan pelaksanaan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali isu strategis Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN		Biro Umum dan Humas	
06		Hubungan dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan Swasta Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan Swasta.	Surat surat yang terkait dengan pelaksanaan	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN		Biro Umum dan Humas	

	07	Hubungan antar Negara, Organisasi Internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan Lembaga dengan Negara lain dan organisasi internasional	Surat surat yang terkait dengan pelaksanaan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali isu strategis Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN		Biro Umum dan Humas
	04	Pemenuhan Informasi publik/PPID Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemenuhan informasi publik	Surat/Data	1 tahun	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
	05	Pengaduan / Aspirasi Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan unjuk rasa, pengaduan masyarakat dan presepsi publik	Surat/Data	1 tahun	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
	06	Keprotokolan									
	01	Penyelenggaraan Acara Kedinasan Naskah-naskah yang berkaitan kegiatan protokol acara kedinasan	Penyelenggaraan acara kedinasan	1 tahun	2 tahun	Musnah kecuali dokumentasi Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
	02	Agenda Kegiatan Pimpinan Lembaga Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadwalan dan pelaksanaan agenda pimpinan.	Agenda Kegiatan Pimpinan Lembaga	1 tahun	1 tahun	Musnah kecuali dokumentasi Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
	03	Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri Arsip yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri pimpinan lembaga/instansi atau pejabat lainnya	Undangan, Lporan, Daftar Hadir	2 tahun	1 tahun	Musnah kecuali dokumentasi Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
	04	Upacara dan Acara Kementerian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial menteri lainnya.	Undangan , Daftar Hadir, Berita Acara, foto dsb.	1 tahun	1 tahun	Musnah kecuali dokumentasi Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
	05	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan perjalanan dinas dalam dan luar negeri pimpinan.	Tiket, Paspor, dan Visa.	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali dokumentasi Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
HK. HUKUM											
	01	Program Legislasi Lembaga/Instansi Naskah-naskah yang terkait dengan penerbitan peraturan perundang-undangan	Usulan program legislasi dari Kementerian BUMN	2 Tahun	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
	02	Produk Hukum									
	01	Undang-undang Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang.	Kajian, Naskah Akademik, Rancangan Undang-undang, Keputusan Pembentukan PAK, Undangan dan Risaiah/Transkrip Rapat Pembahasan (Internal, Panitia Antar Kementerian, Harmonisasi, DPR), sampai diundangkan dan permintaan salinan	1 Tahun setelah diundangkan	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
	02	Peraturan Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan pemerintah.	Kajian Rancangan Peraturan Pemerintah, Keputusan Pembentukan PAK, Undangan dan Risaiah Rapat Pembahasan (Internal, Panitia Antar Kementerian, Harmonisasi), sampai ditetapkan Peraturan Pemerintah dan permintaan salinan	1 Tahun setelah ditetapkan	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
	03	Peraturan Presiden Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan presiden.	Kajian, Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Pembentukan PAK, Undangan dan Risaiah Rapat Pembahasan (Internal, Panitia Antar Kementerian, Harmonisasi), sampai dengan diketapkannya Peraturan Presiden dan permintaan salinan	1 Tahun setelah ditetapkan	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
	04	Peraturan Presiden Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan presiden.	Kajian, Keputusan Pembentukan TIM, Undangan dan Risaiah Rapat Pembahasan (Internal Konsepfor, Antar Unit, dengan BUMN), sampai dengan diketapkannya Peraturan Menteri BUMN dan permintaan salinan	1 Tahun setelah ditetapkan	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
	05	Keputusan Presiden Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Keputusan Keputusan Presiden	Kajian, Nota Dinas dan Surat Pengusulan, Rancangan Keputusan Presiden, Undangan dan Risaiah Rapat Pembahasan, Keputusan Presiden dan permintaan salinan	1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
	06	Keputusan Menteri BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Keputusan Menteri BUMN.	Kajian, Nota Dinas dan Surat Pengusulan, Rancangan Keputusan Menteri BUMN, Undangan dan Risaiah Rapat Pembahasan, Keputusan Menteri BUMN dan permintaan salinan	1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
	07	Instruksi Presiden Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Instruksi Presiden.	Kajian, Nota Dinas dan Surat Pengusulan, Rancangan Instruksi Presiden, Undangan dan Risaiah Rapat Pembahasan, Instruksi Presiden dan permintaan salinan	1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
	08	Instruksi Menteri Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Instruksi Menteri	Kajian, Nota Dinas dan Surat Pengusulan, Rancangan Instruksi Menteri BUMN, Undangan dan Risaiah Rapat Pembahasan, Instruksi Menteri BUMN dan permintaan salinan	1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
	09	Surat Edaran Presiden Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Edaran Presiden Republik Indonesia dan permintaan salinan	Surat Edaran Presiden Republik Indonesia.	1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
	10	Surat Edaran Menteri BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Edaran Menteri BUMN	Kajian, Nota Dinas Pengusulan, Konsep Surat Edaran, Surat Edaran.	1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Dinilai kembali kecuali Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
	11	Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding / Kontrak / Perjanjian Kerjasama Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana perjanjian kerjasama.	Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding / Kontrak / Perjanjian Kerjasama	1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
	12	Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan Salinan Peraturan, Nota Dinas dan Surat Laporan kepada JDIH Pusat termasuk peraturan perundang undangan yang dicipta dari instansi lain.	Data Jaringan dokumentasi informasi hukum	1 Tahun setelah diperbarui	-	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
	13	Keputusan/Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kajian, Nota Dinas Pengusulan, Konsep Surat Edaran, Surat Edaran.	Keputusan/Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN	1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
03											
	01	Bantuan Hukum Perkara Perdata Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penanganan perkara perdata di lembaga peradilan umum, dimulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat peninjauan kembali	Relas, Surat Kuasa Khusus Mewakil Menteri, Akta Perdamaian Dalam Sidang, Gugatan, Jawaban Gugatan, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan Putusan Pengadilan Negeri, Banding, Kontra Memori Banding, Putusan Pengadilan Tinggi, Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Putusan Kasasi, Peninjauan Kembali, Memori PK, Kontra Memori PK, Putusan PK	2 Tahun setelah intrach	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Hukum
	02	Perkara Pidana/Pendampingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pendampingan perkara pidana yang melibatkan pegawai atau pejabat di Kementerian BUMN di tingkat Pengadilan.	(BAP Penyitaan Dokumen, Surat Penggalian Saks)	2 Tahun setelah intrach	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
	03	Perkara Tata Usaha Negara/TUN Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penanganan perkara perdata di lembaga Tata Usaha Negara (TUN), dimulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat peninjauan kembali.	Relas, Surat Kuasa Khusus Mewakil Menteri, Akta Perdamaian Dalam Sidang, Gugatan, Jawaban Gugatan, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan Putusan Pengadilan TUN, Banding, Kontra Memori Banding, Putusan Pengadilan Tinggi TUN, Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Putusan Kasasi, Peninjauan Kembali, Memori PK, Kontra Memori PK, Putusan PK	2 Tahun setelah intrach	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Hukum

	04	Perkara Arbitrase Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penanganan perkara yang bersifat khusus di luar Pengadilan	Berkas Perkara	2 Tahun setelah Inkrach	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Hukum
	05	Perkara Pengadilan Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penanganan perkara yang bersifat khusus, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan terkait yang menaungi.	Berkas Perkara Pengadilan Khusus	2 Tahun setelah Inkrach	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Hukum
	06	Keterangan Ahli Arsip yang berkaitan dengan pendampingan dalam rangka pemberian keterangan ahli dalam perkara pidana di tingkat pengadilan.	Surat Panggilan Pemberian Keterangan Ahli, BAP Keterangan Ahli di Kepolisian/Kejaksaan/KPK	2 Tahun setelah Inkrach	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Hukum
	07	Dukungan Hukum Arsip yang berkaitan dengan dukungan hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh BUMN.	Surat permohonan dukungan hukum dari BUMN, dan surat tanggapan/dukungan hukum dari Kementerian BUMN	2 Tahun setelah Inkrach	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Hukum
04		Penyuluhan hukum dan Pembinaan Kesadaran Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi terkait alat alat hal-hal mengenai BUMN, khususnya yang terkait dengan penanganan hukum baik di dalam proses perdata, pidana, Tata Usaha Negara (TUN), dan sebagainya.	notulensi, bahan seminar/sosialisasi	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN		Biro Hukum
05		Kebijakan umum Anggaran Dasar BUMN dan Perubahannya Naskah-naskah yang berkaitan dengan Anggaran Dasar BUMN seperti Anggaran Dasar (AD) BUMN dalam bentuk AD yang di notarikan (Penser), Peraturan Pemerintah (PP) tentang pendirian BUMN (Perum), Penubahan AD BUMN.	Nota, Konsep dan Penetapan Kebijakan Uum Anggaran Dasar	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN		Asdep Layanan Hukum
IA. INTERNAL AUDIT (INSPEKTORAT)											
01		Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Arsip yang terkait dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	2 tahun setelah anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN		Inspektorat
02		Pelaksanaan Pengawasan									
01		Laporan Hasil Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Audit (audit kinerja Kementerian, audit dengan tujuan tertentu). Laporan Hasil Review (review laporan keuangan Kementerian BUMN, review RKAKL, review RKA BUMN). Laporan Evaluasi (evaluasi sistem AKIP-SAKIP, evaluasi LKIP Eselon I, evaluasi penerapan SPIP), Monitoring dan Asistensi (LHPP BPK, LHP Inspektorat/UPG dll). Laporan Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. yang memerlukan tidak lanjut (TL)	Laporan Hasil Pengawasan	2 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Inspektorat
02		Laporan Hasil Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan berupa Laporan Hasil Audit (audit kinerja Kementerian, audit dengan tujuan tertentu). Laporan Hasil Review (review laporan keuangan Kementerian BUMN, review RKAKL, review RKA BUMN). Laporan Evaluasi (evaluasi sistem AKIP-SAKIP, evaluasi LKIP Eselon I, evaluasi penerapan SPIP), Monitoring dan Asistensi (LHPP BPK, LHP Inspektorat/UPG dll). Laporan Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. yang tidak memerlukan tidak lanjut (TL).	Laporan Hasil Pengawasan	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Inspektorat
03		Audit Investigasi yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut.	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI)	2 tahun setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Inspektorat
04		Monitoring dan Asistensi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Asistensi	Monitoring dan Asistensi (LHPP BPK, LHP Inspektorat/UPG dll)	1 tahun setelah tindak lanjut selesai	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Inspektorat
05		Laporan Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.	Laporan Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.	1 tahun setelah tindak lanjut selesai	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Inspektorat
03		Pengawasan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (termasuk Whistle Blowing System) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Disposisi/surat tugas menteri BUMN-Sekretaris Menteri, Kertas Kerja, dan lain-lain.	Pengawasan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (termasuk Whistle Blowing System)	2 tahun setelah tindak lanjut selesai	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Inspektorat
TI. TEKNOLOGI INFORMASI											
01		Kebijakan dan Perencanaan TI									
01		Master Plan TI Naskah-naskah yang berkaitan dengan Master Plan TI.	Enterprise Architecture, IT Governance and High Level IT Program Road Map & High Level IT Spending Plan beserta undangan dan risalah rapat, dokumen hasil assessment dan peraturan menteri	2 tahun setelah tidak dipergunakan	5 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
02		Kebijakan terkait aplikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi kebijakan terkait aplikasi, arsip kebijakan aplikasi berupa prosedur/SOP terhadap aplikasi yang ada di KBUMN, arsip koordinasi penyajian content (isi) website (portal), arsip koordinasi penyajian content (isi) website (portal), arsip koordinasi pengintegrasian content (isi) website (portal).	Kebijakan terkait aplikasi	2 tahun	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
03		Kebijakan terkait Infrastruktur Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi kebijakan terkait infrastruktur, arsip kebijakan infrastruktur berupa Prosedur/SOP terkait Infrastruktur yang ada di KBUMN, arsip koordinasi pembangunan infrastruktur, arsip koordinasi pengembangan infrastruktur dan arsip koordinasi pemeliharaan infrastruktur	Kebijakan untuk infrastruktur	2 tahun	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
02		Aplikasi Berbasis Elektronik								Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	
01		Pembangunan Aplikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi pembangunan aplikasi	Kesepakatan dengan User terkait pembangunan aplikasi baru, perbaikan atas catatan user, perubahan kebutuhan terhadap aplikasi dan penambahan fitur pada aplikasi dan arsip pembangunan aplikasi	2 tahun setelah tidak dikembangkan	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
02		Pengembangan Aplikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi pembangunan aplikasi dan arsip pengembangan aplikasi	Pengembangan Aplikasi	2 tahun setelah tidak dikembangkan	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
03		Pemeliharaan Aplikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi pemeliharaan aplikasi berupa hasil kesepakatan dengan User terkait dengan pemeliharaan aplikasi	Laporan perbaikan atas catatan user, perubahan kebutuhan terhadap aplikasi dan penambahan fitur pada aplikasi	2 tahun setelah tidak dikembangkan	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI

	04	Manual Penggunaan Aplikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Petunjuk penggunaan aplikasi oleh User Terkait	Manual Penggunaan Aplikasi	2 tahun setelah tidak dikembangkan	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
	05	Pengolahan, perawatan, dan Monitoring Database Naskah-naskah yang berkaitan dengan catatan/log aktivitas monitoring pengelolaan database	Pengolahan, perawatan, dan Monitoring Database	2 tahun setelah tidak dikembangkan	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
03		Infrastruktur								Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	
	01	Data Center (Server, Firewall, UPS, AC Presisi, EMS, Vesda) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembangunan Data Center tentang desain data center beserta topologi jaringan, arsip pengembangan data center tentang perkembangan teknologi dan center terbaru, arsip pemeliharaan data center tentang pengecekan dan pemeliharaan perangkat hardware di data center seperti UPS, AC Presisi, EMS dan Vesda serta back up data.	Data - data terkait Data Center (Server, Firewall, UPS, AC Presisi, EMS, Vesda)	2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
	02	Hardware (Komputer, Laptop, Printer, Scanner, Infokus, IP Phone) Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan hardware, serah terima dan distribusi hardware dan pemeliharaan hardware	Data - data terkait Hardware (Komputer, Laptop, Printer, Scanner, Infokus, IP Phone)	2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
	03	Software (Lisensi, OS, DB, Anti Virus, Software Pendukung) Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan software, serah terima dan distribusi software	Data - data terkait Software (Lisensi, OS, DB, Anti Virus, Software Pendukung)	2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
	04	Networking (Access Point, Switch, Router) Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan peralatan networking	Data - data terkait Networking (Access Point, Switch, Router)	2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
DR. DATA DAN RISET											
	01	Pengumpulan Data berbasis TI Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Kementerian BUMN, meliputi perencanaan kebutuhan data, permintaan kepada pemilik data dan penerimaan data, dengan menggunakan media portal Kementerian BUMN berbasis teknologi informasi	Pengumpulan Data berbasis TI	1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
	02	Penyusunan Basis Data dan Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi dimiliki oleh Kementerian BUMN yang telah dikumpulkan sebelumnya, dengan menggunakan media portal Kementerian BUMN berbasis teknologi informasi	Penyusunan Basis Data dan Kinerja	1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
	03	Penyajian Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengolahan data dan informasi yang dimiliki oleh Kementerian BUMN dengan menggunakan media portal Kementerian BUMN berbasis teknologi informasi, meliputi kegiatan analisis dan penyajian informasi kepada pimpinan atau stakeholders lain yang membutuhkan	Laporan Analisis dan Penyajian Informasi	1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbatas	Panentu Kebijakan, Pelaksanaan kebijakan, Penegak Hukum	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
	04	Knowledge Management Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan manajemen pengetahuan (<i>knowledge management</i>) di lingkungan Kementerian BUMN, meliputi proses perolehan pengetahuan (<i>knowledge acquisition</i>), penyimpanan pengetahuan (<i>knowledge storing</i>), penyebaran pengetahuan (<i>knowledge dissemination</i>), pemanfaatan pengetahuan (<i>knowledge utilization</i>), dan evaluasi pengetahuan (<i>knowledge evaluation</i>)	<i>Knowledge Management</i>	1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
	05	Pengembangan Kajian/Riset								Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	
	01	Makro Ekonomi Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelitian dengan ruang lingkup dan topik yang melibatkan seluruh BUMN, meliputi perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian	Kajian/Riset Makro Ekonomi	1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
	02	Sektor Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelitian ruang lingkup dan topik yang melibatkan sebagian BUMN berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian, meliputi perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian	Kajian/Riset Sektor Industri	1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
	03	Riset Internal Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelitian ruang lingkup dan topik yang melibatkan internal Kementerian BUMN, meliputi perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian	Riset Internal	1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
	04	Pengolahan data riset terkait BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelitian ruang lingkup dan topik yang melibatkan Kementerian BUMN	Riset terkait BUMN	1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
06		Layanan Penyediaan data dan kerjasama riset. Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan penyediaan data dan kerjasama riset yang melibatkan stakeholder.	Data, Korespondensi	1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
II. SUBSTANTIF											
PB. PEMBINAAN BUMN											
	01	Anggaran Dasar BUMN dan Perubahannya Naskah-naskah yang berkaitan dengan Anggaran Dasar BUMN yang berbentuk Persero dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pendirian BUMN Perum beserta perubahannya.	Anggaran Dasar, Peraturan Pemerintah Pendirian Perum	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Teknis
	02	Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemilik Modal dalam memberikan pengesahan atas RJPP BUMN mulai dari penyampaian sampai dengan diterbitkannya pengesahan RJPP meliputi:	-Surat penyampaian Usulan RJPP dari BUMN, beserta Buku RJPP dan Tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, -Undangan, notulen dan daftar hadir rapat pembahasan -Bahan presentasi Direksi -Nota Dinas laporan dan analisis usulan RJPP -Surat pengesahan RJPP	1 tahun setelah diperbarui	2 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Teknis

	01	Penilaian Bakal Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengusulan calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta pelaksanaan penilaian Bakal Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN antara lain meliputi:	- CV Bakal Calon Dekom/Dewas BUMN - Hasil assessment oleh lembaga profesional - Surat Rekomendasi/Usulan Kementerian/Lembaga/ Instansi - Hasil Penilaian Pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain - Hasil Penilaian Pemenuhan Persyaratan Materiil - Laporan Hasil Penilaian Bakal Calon Dekom/Dewas BUMN	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
	02	Pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN antara lain meliputi:	- Nota dinas usulan pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas - Surat keputusan Menteri BUMN tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan salinannya serta Surat penampalan salinannya - Kontrak Manajemen/Surat Pernyataan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas - Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas - Undangan dan Berita Acara Rencana Pemberitahuan Pemberhentian untuk Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang diberhentikan sebelum habis masa jabatan	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
	12	Pergantian Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN antara lain meliputi:	- Surat usulan penggantian atau pengangkatan Direksi /Dewan Komisaris anak perusahaan - Surat rekomendasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN - Nota Dinas dan Surat persetujuan Menteri BUMN	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
	13	Monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas/Pejabat BUMN	Monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN BUMN	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
	14	Master Plan TI BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan dan Master Plan TI BUMN	Master Plan TI BUMN	1 tahun setelah diperbarui	2 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
UV. PENGEMBANGAN USAHA DAN PRIVATISASI BUMN											
	01	Penyusunan Usaha									
	01	Penyusunan Aspirasi Pemegang Saham Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan aspirasi pemegang saham berupa kajian, masukan dari kedeputan teknis dan narasumber, persetujuan penetapan dan sosialisasi	Aspirasi Pemegang Saham	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
	02	Road Map Pembinaan BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana pengelolaan BUMN di masa yang akan datang termasuk di dalamnya rencana holding sektoral dan sejenisnya, kajian, sosialisasi, evaluasi dan surat penetapan	Road Map Pembinaan BUMN	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
	03	Evaluasi Road Map Pembinaan BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap Road Map pembinaan BUMN	Laporan hasil evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
	04	Kebijakan Deviden Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala bentuk proses pengusulan, penyusunan, kebijakan dan persetujuan penetapan dividen	Kebijakan Deviden	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
	02	Privatisasi BUMN									
	01	Program Privatisasi Tahunan (PTP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses privatisasi dari mulai pengajuan privatisasi oleh BUMN, Kedeputan teknis atau pengusulan oleh pemerintah hingga mendapat persetujuan dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Komite Privatisasi dan DPR RI	Program Privatisasi Tahunan (PTP)	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
	02	Pelaksanaan Privatisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan privatisasi yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan yang kegiatannya antara lain seleksi para profesi penunjang, proses terbitnya PP pelaksanaan privatisasi hingga pelaporan pelaksanaan privatisasi	Pelaksanaan Privatisasi	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
	03	Sinergi BUMN dan Anak Perusahaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan seluruh proses kegiatan sinergi BUMN, anak perusahaan BUMN, cucu BUMN dan lain-lain dari mulai identifikasi adanya potensi sinergi BUMN, action dari rencana sinergi BUMN dan pelaporan pelaksanaan sinergi BUMN	Kebijakan Sinergi BUMN dan Anak Perusahaan	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
	04	Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)									
	01	Pengusulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala bentuk proses usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari BUMN ke kedeputan teknis, Kementerian BUMN ke Kementerian Keuangan hingga persetujuan dari DPR RI	Pengusulan Penyertaan Modal Negara (PMN)	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
	02	Penerbitan PP tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala proses penerbitan PP antara lain kajian bersama, pembahasan antar instansi hingga pembahasan RPP sampai dengan terbitnya PP	Penerbitan PP tentang Penyertaan Modal Negara (PMN)	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN)	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
	05	Penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala bentuk penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) kepada para pihak baik BUMN dan Kementerian terkait	Rekomendasi Penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN

06	Penyelesaian Rekening Dana Investasi (RDI) Subsidiary Loan Agreement (SLA) Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala bentuk penyelesaian Rekening Dana Investasi (RDI) Subsidiary Loan Agreement (SLA) berupa pengusulan dari BUMN ke kedeputan teknis, penetapan dan laporan akhir kepada Menteri BUMN	Rekomendasi Penyelesaian Rekening Dana Investasi (RDI)/ Subsidiary Loan Agreement (SLA)	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
07	Public Service Obligation (PSO) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendataan Public Service Obligation (PSO)	persetujuan/kebijakan PSO	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
RP. Restrukturisasi dan Kebijakan Strategi Pengelolaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas										
01	Restrukturisasi Sektoral BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Restrukturisasi Sektoral BUMN berupa konsep kajian bersama, pembahasan kajian bersama, penyampaian rencana restrukturisasi kepada Menteri Keuangan dan atau Presiden, pembahasan kajian bersama dan RPP dengan Kementerian terkait, Peraturan Pemerintah terkait, Pelaksanaan restrukturisasi sektoral/korporasi.	Kajian, Surat, Risalah Rapat	2 tahun	8 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Restrukturisasi BUMN dan PPKMN
02	Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas									
01	Bahan aspirasi Kepentingan Pemerintah untuk BUMN Minoritas Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan aspirasi kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham pada perusahaan dengan kepemilikan minoritas, antara lain: Surat yang ditujukan ke Direksi/ Dekom sebagai wakil pemerintah dan/ atau bukan sebagai wakil pemerintah	Surat, Nota	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Restrukturisasi BUMN dan PPKMN
02	Analisis Laporan Kinerja Perusahaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas, antara lain: laporan tahunan perusahaan, laporan manajemen (Audited), dan laporan triwulan I, II, dan III	Laporan Analisis Kinerja	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN		Asdep Restrukturisasi BUMN dan PPKMN
03	Analisis, Monitoring, dan evaluasi atas aksi korporasi strategis Naskah-naskah yang berkaitan dengan bahan analisis, monitoring dan evaluasi atas aksi korporasi strategis, isu-isu strategis perusahaan, analisis bahan sebagai wakil pemerintah dalam public expose perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas	Laporan Analisis dan monitoring/ evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN		Asdep Restrukturisasi BUMN dan PPKMN
04	Data kinerja perusahaan sistem informasi Kementerian Naskah-naskah yang berkaitan dengan update data kinerja perusahaan dengan kepemilikan negara	Data	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN		Asdep Restrukturisasi BUMN dan PPKMN
05	Pembinaan pengelolaan portofolio kepemilikan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan bahan analisis isu pembinaan perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas	Surat, Nota, Laporan	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN		Asdep Restrukturisasi BUMN dan PPKMN
06	Laporan Keuangan Kombinasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan kombinasi seluruh BUMN	Laporan Keuangan Kombinasi	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Restrukturisasi BUMN dan PPKMN
MB. Manajemen SDM Eksekutif BUMN										
01	Data Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN									
01	Data Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan perubahan susunan keanggotaan Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang akan habis masa jabatan atau data lainnya.	Data Direksi dan Dewan Komisaris	1 tahun Setelah diperbarui	2 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
02	Data Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan perubahan susunan keanggotaan Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN yang akan habis masa jabatan atau data lainnya.	Data Direksi dan Dewan Komisaris	1 tahun Setelah diperbarui	2 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
02	Kebijakan Terkait Key Performance Indicator (KPI) Direksi/Dekom/Dewas BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan penetapan kebijakan terkait Key Performance Indicator (KPI) bagi Direksi dan Dekom/Dewas BUMN.	Surat, Nota	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
03	Kebijakan dan koordinasi pengelolaan informasi SDM Eksekutif BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan monitoring atas pemenuhan data portal SDM BUMN	Surat, Nota, Data pengangkatan dan pemberhentian Direksi atau Dekom/Dewas BUMN, dan Nota Dinas/Memo tentang updating dan validasi data portal SDM	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali kebijakan Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
04	Pengembangan SDM Eksekutif BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan bahan-bahan perumusan program pengembangan Direksi/Calon Direksi BUMN, bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang kegiatan pengembangan SDM Eksekutif BUMN.	Surat /kebijakan Menteri BUMN tentang pengembangan SDM eksekutif BUMN, Kurikulum pengembangan SDM Eksekutif BUMN, dan Laporan Pelaksanaan Program Pengembangan SDM Eksekutif BUMN	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
05	Kebijakan dan Evaluasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan evaluasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada BUMN	Surat /Kebijakan Menteri BUMN tentang Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada BUMN.	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali kebijakan Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
06	Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Good Corporate Governance pada BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan evaluasi penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN	Surat /Kebijakan Menteri BUMN tentang Good Corporate Governance (GCG) dan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada seluruh BUMN	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali kebijakan Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN

07	Kebijakan dan Evaluasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Wajib Lapor BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan dan evaluasi atas kewajiban kepada seluruh Wajib Lapor BUMN untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan KPK	Surat/Kebijakan tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Evaluasi Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada seluruh BUMN	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali kebijakan Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
08	Kebijakan dan Evaluasi pelaksanaan Outsourcing BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan evaluasi ketenagakerjaan/outsourcing di BUMN.	Surat/Kebijakan tentang outsourcing BUMN dan Laporan Monitoring Pelaksanaan Surat Edaran/Kebijakan Menteri BUMN tentang outsourcing BUMN	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali kebijakan Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Asdep MSE	Asdep MSE BUMN
09	Remunerasi Direksi Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan remunerasi Direksi Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN	SK/Penetapan Remunerasi, Data	2 Tahun	5 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Asdep MSE	Asdep MSE BUMN
10	Assesment Center Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penetapan Assesment Center bagi calon direksi/Dewan Komisaris BUMN/anak perusahaan BUMN	SK/Penetapan Assesment Center	2 Tahun	5 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Asdep MSE	Asdep MSE BUMN
11	Talent BUMN									Asdep MSE BUMN
01	Talent Internal BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan CV/hasil Assesment nama - nama untuk dijadikan bakal calon Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang tidak/belum diproses lebih lanjut menuju tahap uji kelayakan dan keputusan yang berasal dari internal BUMN	CV dan hasil Assesment	2 Tahun setelah pelaksanaan Assesment	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
02	Talent Eksternal BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan CV/hasil Assesment nama - nama untuk dijadikan bakal calon Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang tidak/belum diproses lebih lanjut menuju tahap uji kelayakan dan keputusan yang berasal dari eksternal BUMN	CV dan hasil Assesment	2 Tahun setelah pelaksanaan Assesment	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
SL. TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN										
01	Kebijakan Program TJSL Kementerian BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kegiatan Inisiatif dari KBUMN mengenai kegiatan TJSL/PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), seperti Kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri, Siswa Mengenal Nusantara, dan lainnya	-Nota dinas/surat/risalah terkait Kegiatan Inisiatif dari Kementerian BUMN/Pemerintah -Naskah Dinas terkait Pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN tentang TJSL/PKBL	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep TJSL
02	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan TJSL Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) meliputi Naskah Dinas terkait Kegiatan Movev TJSL/PKBL, Laporan dan rekomendasi Movev, Pengelolaan dan Analisis Data TJSL/PKBL	-Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Tanggung jawab sosial BUMN -Naskah Dinas terkait Kegiatan Movev TJSL/PKBL -Laporan dan rekomendasi Money -Pengelolaan dan Analisis Data TJSL/PKBL	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak berdampak apapun bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep TJSL
03	Data TJSL BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan dan realisasi pengelolaan data TJSL BUMN	Data TJSL BUMN	1 tahun setelah pelaksanaan	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN		Asdep TJSL

Klasifikasi	Deskripsi	Jenis Arsip
FASILITATIF		
RC.PERENCANAAN		
RC.01	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
RC.02	RPJMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
RC.03	Rencana strategis (Renstra)	
RC.03.01	Renstra Kementerian Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis Kementerian BUMN yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).	Renstra Kementerian
RC.03.02	Renstra Unit Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis Unit eselon 1 Kementerian BUMN yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	Renstra Unit Kerja
RC.04	Rencana Kerja	

RC.04.01	Rencana Kerja Kementerian Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan unit kerja Kementerian BUMN terdiri dari hasil pembahasan dari pertemuan multilateral, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, pertemuan Trilateral (Bappenas, Dirjen Anggaran/DJA, KBUMN) dan Bilateral (Bappenas/DJA, KBUMN).	Rencana kerja Kementerian
RC.04.02	Rencana Kerja Unit Kerja Arsip yang terkait Naskah-naskah yang berkaitan program dan kegiatan unit kerja eselon II yang merupakan penjabaran dari Renstra dalam satu tahun anggaran.	Rencana kerja unit kerja
RC.05	Ketetapan Pagu Indikatif/Sementara Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penetapan pagu indikatif/sementara.	Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, RKAKL masing-masing unit kerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) perencanaan, RAB dan persetujuan Komisi VI DPR RI.
RC.06	Ketetapan Pagu Definitif Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penetapan pagu definitif	Surat Menteri Keuangan tentang alokasi pagu definitif, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/ Lembaga (KL) masing-masing unit kerja, KAK Perencanaan, Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan Persetujuan Komisi VI DPR RI.
RC.07	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Revisi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan proses persetujuan revisi anggaran terdiri dari DIPA APBN, DIPA APBN-P dan DIPA Revisi	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan proses persetujuan revisi anggaran terdiri dari DIPA APBN, DIPA APBN-P dan DIPA Revisi.

RC.08	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) termasuk revisinya Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengisian aplikasi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari masing-masing unit kerja termasuk revisinya.	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) termasuk revisinya.
RC.09	Penetapan Kinerja	
RC.09.01	Penetapan Kinerja Menteri BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Penetapan Kinerja (PK) Kementerian BUMN.	PK Kementerian BUMN
RC.09.02	Penetapan Kinerja Unit Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Penetapan Kinerja (PK) masing-masing unit kerja.	PK Unit Kerja
RC.10	Pelaporan/Output Kinerja	
RC.10.01	Laporan Pelaksanaan Program Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pelaksanaan program kerja.	Laporan Pelaksanaan Program Kerja triwulan, semester dan tahunan.
RC.10.02	Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan monitoring dan evaluasi program kerja.	Laporan Monitoring dan Evaluasi program Kerja baik bulanan, triwulan dan semester.
RC.11	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan LAKIP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian dan Unit Kerja
RC.12	Penetapan Ukuran Kinerja	
RC.12.01	Penetapan Ukuran Kinerja kementerian Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan indikator kinerja utama Kementerian BUMN.	Penetapan Ukuran Kinerja
RC.12.02	Penetapan Ukuran Kinerja Unit Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan indikator kinerja unit.	Penetapan Ukuran Kinerja

RC.13	Monitoring Kinerja	
RC.13.01	Monitoring Kinerja Kementerian Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring kinerja Kementerian	Kinerja Kementerian
RC.13.02	Monitoring Kinerja Unit Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring kinerja Unit Kerja	Kinerja Unit
RC.14	Arsitektur dan Informasi Kinerja Kementerian BUMN dan unit kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan Arsitektur dan Informasi Kinerja Kementerian BUMN dan unit kerja	Arsitektur dan Informasi Kinerja Kementerian BUMN dan unit kerja
SM.SUMBER DAYA MANUSIA		
SM.01	Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM)	
SM.01.01	Analisis Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan data tentang suatu jabatan atau pekerjaan untuk menetapkan uraian jabatan atau pekerjaan.	Data Analisi Jabatan
SM.01.02	Penetapan Kebutuhan SDM Naskah-naskah yang berkaitan dengan Arsip yang terkait penetapan kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Penetapan Kebutuhan SDM
SM.01.03	Formasi Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan persetujuan Formasi Pegawai ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Formasi Pegawai
SM.02	Pendelegasian Wewenang	
SM.02.01	Penetapan Pejabat Plh Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan Pejabat Pelaksana Harian.	Penetapan Pejabat Plh

SM.02.02	Penetapan Pejabat Plt Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan Pejabat Pelaksana Tugas.	Penetapan Pejabat Plt
SM.03	Pengadaan SDM ASN (PNS)	
SM.03.01	Penerimaan SDM Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan, meliputi seleksi administrasi, pemanggilan peserta test, pelaksanaan ujian tertulis, dan wawancara.	Pengumuman, soal ujian, daftar hadir, berita acara.
SM.03.02	Penetapan Pengumuman Kelulusan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengadaan, meliputi pengumuman setiap tahapan seleksi/ test dan kelulusan akhir	Penetapan Pengumuman Kelulusan
SM.03.03	Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan Kelengkapan Penetapan NIP	Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP
SM.03.04	Nota Usul Pengangkatan CASN menjadi ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan pengangkatan CASN menjadi ASN	Nota Usul Pengangkatan CASN menjadi ASN
SM.03.05	Surat Keputusan CASN/ASN Kolektif Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan CASN/ASN Kolektif	Surat Keputusan CASN/ASN Kolektif
SM.03.06	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima Naskah-naskah yang berkaitan dengan lamaran pendaftar yang tidak diterima	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima

SM.04	Pengadaan SDM ASN (Non PNS) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan Pegawai ASN Non PNS/PPNPN dan Pegawai Alih Pengetahuan dari BUMN (Madang)	Pengadaan Pengadaan Pegawai non PNS dan Alih Pengetahuan
SM.05	Pengadaan Jabatan Pimpinan Tinggi	
SM.05.01	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.	SK pembentukan TIM, Pengumuman, Panitia Seleksi, Daftar Hadir, Bahan Presentasi, Risalah, Surat Pengajuan Calon ke Presiden, Laporan kepada Komisi ASN.
SM.05.02	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.	SK pembentukan TIM, Pengumuman, Panitia Seleksi, Daftar Hadir, Bahan Presentasi, Risalah, Surat Pengajuan Calon ke Menteri, Laporan kepada Komisi ASN.
SM.05.03	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas lamaran yang tidak diterima.	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima
SM.06	Pengembangan Kompetensi SDM	
SM.06.01	Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penugasan Diklat, Kursus pegawai.	Surat Perintah, Surat Tugas, Laporan Pelaksanaan Diklat, Sertifikat Diklat.
SM.06.02	Tugas Belajar, Izin Belajar Naskah-naskah yang berkaitan dengan penugasan Tugas Belajar, Izin Belajar pegawai	Surat Tugas Belajar, Surat Izin Belajar, Ijazah
SM.06.03	Ujian Dinas Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan penugasan pegawai Ujian Dinas Pegawai.	Surat Perintah, Surat Tugas, Surat Keterangan Lulus

SM.06.04	Asesmen Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan asesmen pegawai.	Surat Perintah, Surat Tugas, Laporan Hasil Asesmen.
SM.07	Pembinaan SDM	
SM.07.01	Disiplin Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan disiplin pegawai.	Daftar Hadir dan Rekapitulasi Daftar Hadir
SM.07.02	Penilaian Prestasi Kerja (PPK) ASN PNS Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja ASN (PNS)	Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
SM.07.03	Penilaian Prestasi Kerja (PPK) ASN Non PNS/Magang BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Atasan ASN Non PNS terhadap sasaran kerja dan perilaku kerja ASN Non PNS/Magang BUMN	Laporan Prestasi Kerja
SM.07.04	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usulan yang berisi hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit, Penetapan Angka Kredit

SM.07.05	Berkas Hukuman Disiplin/Pemberhentian Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumentasi proses penjatuhan hukuman disiplin PNS dimulai dari dokumen pemanggilan, berita acara pemeriksaan dan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin.	Berkas Hukuman Disiplin/Pemberhentian
SM.07.06	Penghargaan dan Tanda Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.	Penghargaan dan Tanda Jasa
SM.08	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai.	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai
SM.09	Mutasi SDM	
SM.09.01	Alih Status, pindah instansi, diperbantukan, dipekerjakan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala perubahan mengenai seseorang ASN seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain.	Alih Status, pindah instansi, diperbantukan, dipekerjakan, nota persetujuan/pertimbangan Kepala BKN.

SM.09.02	Rotasi Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala perubahan mengenai seseorang ASN seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain.	SK Rotasi Kerja
SM.09.03	Penyesuaian Masa Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses untuk menghitung masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok .	SK Penyesuaian Masa Kerja
SM.09.04	Mutasi Keluarga Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala perubahan mengenai segala perubahan mutasi keluarga ASN.	Surat Izin Pernikahan/Perceraian, Surat Penolakan Izin, Akta Nikah/Cerai, Akta Kelahiran Anak, Surat Keterangan Meninggal Dunia
SM.09.05	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usulan yang berisi daftar nama pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk mendapatkan dapat diangkat/diberhentikan dalam jabatan struktural tertentu.	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural
SM.09.06	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usulan yang berisi daftar nama pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk mendapatkan dapat diangkat/diberhentikan dalam jabatan fungsional tertentu.	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional

SM.09.07	Usul Kenaikan Pangkat/Golongan Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usulan yang berisi daftar nama pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk mendapatkan kenaikan pangkat pada periode tertentu	Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
SM.09.08	Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usulan yang berisi daftar nama pegawai yang akan dilakukan perubahan data dasar/status/ kedudukan hukumnya	Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai
SM.09.09	Berkas Baperjakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumentasi dalam memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian di lingkungan kementerian BUMN	Berkas Baperjakat
SM.09.10	Pelantikan Pejabat Struktural/JFU Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengesahan pejabat dalam jabatan struktural/umum yang telah ditetapkan melalui surat keputusan Pejabat Pembina Kenerawaian	Pelantikan Pejabat Struktural/JFU
SM.10	Administrasi Pegawai	
SM.10.01	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas/Surat Izin Naskah-naskah yang berkaitan dengan perintah/arahan/izin yang diberikan oleh pihak atasan atau instansi kepada bawahan atau anggota instansi agar melaksanakan dinas/tugas/izin tertentu yang diberikan atasan.	Perintah Dinas/Surat Tugas/Surat Izin

SM.10.02	Cuti Besar Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian cuti yang dapat diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya enam tahun secara terus-menerus.	Cuti Besar
SM.10.03	Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan izin cuti pegawai untuk meninggalkan pekerjaan karena alasan yang dapat diterima (sakit, bersalin, menjalankan cuti tahunan)	Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti tahunan
SM.10.04	Cuti Alasan Penting Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian cuti yang diberikan kepada Pegawai karena adanya alasan yang penting.	Cuti Alasan Penting
SM.10.05	Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian cuti yang diberikan kepada pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus dikarenakan alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak.	Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
SM.10.06	Dokumentasi Identitas Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendataan identitas pribadi PNS dan keluarganya.	usul penetapan karpeg/KPE/Karis/Karsu, Keanggotaan Organisasi profesi/kedinasan, Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4), Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), LHKPN, LHKASN.
SM.11	Kesejahteraan Pegawai	
SM.11.01	Gaji, Tunjangan Uang Makan, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Suami/Istri Naskah-naskah yang berkaitan dengan belanja gaji pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil.	Gaji

SM.11.02	Tunjangan Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan belanja tunjangan kinerja pegawai.	Tunjangan Kinerja
SM.11.03	Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan pemeliharaan kesehatan pegawai seperti proses pemeriksaan kesehatan berkala dan <u>medical record</u>	Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
SM.11.04	Registrasi Surat Keterangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses registrasi surat keterangan PNS Non PNS.	Registrasi Surat Keterangan
SM.11.05	Layanan Asuransi Pegawai/BPJS Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada PNS dalam program jaminan kesehatan bagi PNS Non PNS	Layanan Asuransi Pegawai/BPJS
SM.11.06	Layanan Tabungan Perumahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan bantuan dana dari hasil pemupukan yang tidak harus dikembalikan untuk digunakan oleh PNS dalam memenuhi kebutuhan uang muka pembelian rumah sejahtera melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah atau kredit/pembiayaan membangun rumah diatas tanah sendiri, termasuk untuk biaya-biaya terkait kredit/pembiayaan rumah atau yang dipersyaratkan oleh bank.	Layanan Tabungan Perumahan

SM.11.07	<p>Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan kepada keluarga/ahli waris PNS yang meninggal karena dinas yang terdiri atas Gaji Terusan, Jaminan Kematian, Asuransi Kematian/Askem (THT), Asuransi Dwiguna (THT), Pensiun Janda/Duda/Anak, Pengembalian Uang Tanam PNS</p>	Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas
SM.11.08	<p>Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara</p>	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
SM.11.09	<p>Layanan Olahraga dan Rekreasi</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada PNS dalam bentuk kesempatan/fasilitas untuk berolahraga dan rekreasi yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	Layanan Olahraga dan Rekreasi
SM.11.10	<p>Layanan Kesejahteraan Lain (fasilitas kredit)</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada PNS untuk memperoleh surat keterangan dari instansi dalam rangka mendapatkan fasilitas dari pihak tertentu.</p>	Layanan Kesejahteraan Lain (fasilitas kredit)
SM.12	<p>Perselisihan/Sengketa Kepegawaian</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perselisihan/Sengketa Kepegawaian</p>	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian

SM.13	Penugasan Pegawai Kementerian Naskah-naskah yang berkaitan dengan penugasan pegawai Kementerian BUMN sebagai Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas/Organ Dewan Komisaris di BUMN/Anak Perusahaan BUMN.	Penugasan Pegawai Kementerian
SM.14	Pemberhentian Pegawai/Pensiun	
SM.14.01	Pemberhentian dengan Hormat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan hormat.	SK Pemberhentian dan SK Pensiun.
SM.14.02	Pemberhentian dengan tidak Hormat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat.	SK Pemberhentian.
SM.14.03	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Jandanya/Dudanya & PNS yang meninggal Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses usulan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/jandanya/ dudanya dan ASN yang meninggal.	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Jandanya/Dudanya & PNS yang meninggal
SM.15	Magang Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan Magang SMA/SMK atau mahasiswa atau pegawai dari perusahaan lain.	Magang
SM.16	Personal File/Office Automation	

SM.16.01	Lamaran Naskah-naskah yang vberkaitan dengan berkas lamaran	Lamaran
SM.16.02	Nota persetujuan/pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Nota persetujuan/pertimbangan Kepala BKN.	Nota persetujuan/pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
SM.16.03	Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS/CASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pengangkatan CPNS/CASN.	Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS/CASN

SM.16.04	Hasil pengujian kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil pengujian kesehatan.	Hasil pengujian kesehatan
SM.16.05	Copy kartu pegawai (KARPEG) Naskah-naskah yang berkaitan dengan copy KARPEG.	Copy kartu pegawai (KARPEG)
SM.16.06	SK kenaikan gaji berkala Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK kenaikan gaji berkala.	SK kenaikan gaji berkala

SM.16.07	<p>Surat pernyataan melaksanakan tugas/menduduki jabatan/surat pernyataan pelantikan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas/menduduki jabatan/surat pernyataan pelantikan.</p>	Surat pernyataan melaksanakan tugas/menduduki jabatan/surat pernyataan pelantikan
SM.16.08	<p>SK pengangkatan dalam atau pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pengangkatan dalam atau pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional.</p>	SK pengangkatan dalam atau pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional
SM.16.09	<p>SK perpindahan wilayah kerja</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK perpindahan wilayah kerja.</p>	SK perpindahan wilayah kerja

SM.16.10	SK perpindahan antar instansi Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK perpindahan antar instansi.	SK perpindahan antar instansi
SM.16.11	SK peninjauan masa kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK peninjauan masa kerja.	SK peninjauan masa kerja
SM.16.12	SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK CTLN.	SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN)

SM.16.13	Berita acara pemeriksaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan berita acara pemeriksaan.	Berita acara pemeriksaan
SM.16.14	SK hukuman jabatan/hukuman disiplin PNS/ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK hukuman jabatan/hukuman disiplin PNS/ASN.	SK hukuman jabatan/hukuman disiplin PNS/ASN
SM.16.15	SK perbantuan kepala daerah otonom/instansi lain Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK perbantuan kepala daerah otonom/instansi lain.	

SM.16.16	SK penarikan kembali dari perbantuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK penarikan kembali dari perbantuan.	SK penarikan kembali dari perbantuan
SM.16.17	SK pemberian uang tunggu Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pemberian uang tunggu.	SK pemberian uang tunggu
SM.16.18	SK pemberhentian sebagai PNS/ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pemberhentian sebagai PNS/ASN.	SK pemberhentian sebagai PNS/ASN

SM.16.19	SK pemberhentian sementara Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pemberhentian sementara.	SK pemberhentian sementara
SM.16.20	SK pengangkatan/pemberhentian sebagai Pejabat Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pengangkatan/pemberhentian sebagai Pejabat Negara.	SK pengangkatan/pemberhentian sebagai Pejabat Negara
SM.16.21	SK pembebasan dari jabatan organik karena diangkat sebagai pejabat negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pembebasan dari jabatan organik karena diangkat sebagai pejabat negara.	SK pembebasan dari jabatan organik karena diangkat sebagai pejabat negara

SM.16.22	SK pengalihan PNS/ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pengalihan PNS/ASN.	SK pengalihan PNS/ASN
SM.16.23	Surat keterangan pernyataan hilang Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan pernyataan hilang.	Surat keterangan pernyataan hilang
SM.16.24	Surat kembalinya PNS yang dinyatakan hilang Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat kembalinya PNS yang dinyatakan hilang.	Surat kembalinya PNS yang dinyatakan hilang

SM.16.25	SK penggantian nama Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK penggantian nama.	SK penggantian nama
SM.16.26	Surat perbaikan tanggal tahun kelahiran PNS/ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat perbaikan tanggal tahun kelahiran PNS/ASN.	Surat perbaikan tanggal tahun kelahiran PNS/ASN
SM.16.27	Isian formulir Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Isian formulir PUPNS.	Isian formulir Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS)

SM.16.28	Berita acara pengambilan sumpah Naskah-naskah yang berkaitan dengan berita acara pengambilan sumpah.	Berita acara pengambilan sumpah
SM.16.29	Penetapan angka kredit Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan angka kredit.	Penetapan angka kredit
SM.16.30	Surat tugas/izin belajar dalam/luar negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat tugas/izin belajar dalam/luar negeri.	Surat tugas/izin belajar dalam/luar negeri

SM.16.31	SK kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.	SK kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
SM.16.32	Surat izin menjadi anggota Partai Politik (Parpol)/Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat izin menjadi anggota Parpol/Ormas/LSM.	
SM.16.33	Surat pencabutan izin menjadi anggota Parpol Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat pencabutan izin menjadi anggota Parpol.	Surat pencabutan izin menjadi anggota Parpol

SM.16.34	<p>Surat keterangan meninggal dunia/hilang Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan meninggal dunia/hilang.</p>	Surat keterangan meninggal dunia/hilang
SM.16.35	<p>Surat keterangan mutasi keluarga Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan mutasi keluarga.</p>	Surat keterangan mutasi keluarga
SM.16.36	<p>Surat keterangan peningkatan pendidikan Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan peningkatan pendidikan.</p>	<p>Surat keterangan peningkatan pendidikan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan peningkatan pendidikan.</p>

SM.16.37	<p>Surat keterangan hasil penelitian khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan hasil penelitian khusus.</p>	Surat keterangan hasil penelitian khusus
SM.16.38	<p>Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala.</p>	Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
SM.16.39	<p>Surat izin berpergian ke luar negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat izin berpergian ke luar negeri.</p>	Surat izin berpergian ke luar negeri

SM.16.40	Kartu induk PNS/ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kartu induk PNS/ASN.	Kartu induk PNS/ASN
SM.16.41	SK penempatan/penarikan pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK penempatan/penarikan pegawai.	SK penempatan/penarikan pegawai
SM.16.42	SK penarikan kembali dari perbantuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK penarikan kembali dari perbantuan.	SK penarikan kembali dari perbantuan

SM.16.43	SK pertimbangan status PNS/ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pertimbangan status PNS/ASN.	SK pertimbangan status PNS/ASN
SM.16.44	SK persetujuan/penugasan kembali cuti di luar tanggungan negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK persetujuan/penugasan kembali CTLN.	SK persetujuan/penugasan kembali cuti di luar tanggungan negara
SM.16.45	Surat keterangan pengunduran diri/diberhentikan sebagai PNS/ASN karena menjadi pengurus/anggota Parpol Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan pengunduran diri/diberhentikan sebagai PNS/ASN, karena menjadi pengurus/anggota Parpol.	Surat keterangan pengunduran diri/diberhentikan sebagai PNS/ASN karena menjadi pengurus/anggota Parpol

SM.16.46	SK pensiun Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pensiun.	SK pensiun
SM.17	Berkas Menteri/Wakil Menteri Sebagai Pejabat Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan Berkas Menteri/Wakil Menteri sebagai Pejabat Negara	Berkas Menteri/Wakil Menteri sebagai Pejabat Negara
OR.ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI		
OR.01	Organisasi	
OR.01.01	Struktur Organisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Menteri mengenai Rancangan Perpres tentang Kementerian BUMN Surat Menteri tentang Rancangan Permen tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian (konsep Permen dan Naskah Akademik/Paparan), Persetujuan Menpan atas Konsep Peraturan Presiden	Penetapan Struktur Organisasi
OR.01.02	Evaluasi Organisasi Naskah naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi organisasi Kementerian BUMN	Laporan hasil evaluasi

OR.01.03	Penetapan Portofolio BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keputusan Menteri/atas Nama Menteri terkait penetapan portofolio BUMN	Penetapan Portofolio BUMN
OR.02	Informasi Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisi jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, jabatan fungsional umum.	SK Informasi Jabatan
OR.03	Evaluasi Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum, dan Peraturan Menteri BUMN tentang Grading.	Peraturan Menteri Evaluasi Jabatan
OR.04	Analisis Beban Kerja (ABK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum, dan Surat Keputusan tentang Analisis Beban Kerja (ABK).	Analisis Beban Kerja (ABK)
OR.05	Penetapan/Penyelarasan SOP Naskah-naskah yang berkaitan dengan Usulan SOP Unit, Pembahasan SOP, Pengesahan SOP, Mekanisme Kerja/Tata hubungan kerja, dan Evaluasi atas Implementasi SOP	SOP
OR.06	Reformasi Birokrasi	
OR.06.01	Pelaksanaan Program RB Naskah-naskah yang berkaitan dengan Road Map RB, Program Tahunan RB, SK Tim RB. ND, Risalah Rapat, dan Laporan Pelaksanaan Program dan Monitoring RB.	Road Map Reformasi Birokrasi, Pelaksanaan Program RB

OR.06.02	PENILAIAN PMPRB Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi.	PMPRB
UM. UMUM		
UM.01	Perencanaan dan Realisasi Pengadaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen RUP (Rancangan Umum Pengadaan) rencana pengadaan dalam satu tahun ke depan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan daftar realisasi pengadaan	Perencanaan dan Realisasi Pengadaan
UM.02	Pengadaan Barang dan Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pengadaan barang dan jasa	Nota permintaan barang dan jasa dari PPK kepada kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) , Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang merupakan dokumen klasifikasi awal, Rancangan Kontrak, Undangan, Notulen, Daftar Hadir terkait pengadaan, Dokumen Prakualifikasi, Dokumen Pemilihan, Dokumen Penawaran yang disubmit oleh calon penyedia, dokumen pengadaan yang memuat tentang syarat-syarat dan klasifikasi apa saja yang harus dipenuhi oleh calon penyedia, Berita Acara Pengadaan, dan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ)
UM.03	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	

UM.03.01	Penatausahaan Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penetapan Status Penggunaan (PSP), Penggunaan Sementara Gedung dan Inventarisasi, dokumen usulan penetapan penggunaan barang, dokumen penetapan penggunaan barang, Daftar Barang Milik Negara/Buku Inventaris, Berita Acara Inventarisasi BMN, Dokumen Laporan BMN, Dokumen Laporan Persediaan, Perjanjian Penggunaan Sementara, Usulan Penggunaan Sementara	Penatausahaan Barang Milik Negara
UM.03.02	Pemanfaatan BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendayagunaan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan yang terdiri dari Permohonan Pemanfaatan oleh Pihak ekstern, Usulan Pemanfaatan, Persetujuan Pemanfaatan, Perjanjian Pemanfaatan, BAST Pemanfaatan, Addendum Perjanjian Pemanfaatan, Laporan Hasil Pemanfaatan	Pemanfaatan BMN
UM.03.03	Pemindahtanganan/Penghapusan Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemindahtanganan baik berupa penghapusan, hibah maupun pemusnahan	Usulan Pemindahtanganan dan Penghapusan, Dokumen Pembentukan Tim Penghapusan, Berita Acara Penetapan Limit, Persetujuan Pemindahtanganan, Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima (BAST) Pemindahtanganan, Keputusan Penghapusan, Laporan Lelang

UM.03.04	Monitoring Naskah-naskah yang berkaitan dengan tagihan atas penggunaan listrik dan air oleh tenant maupun tagihan atas sewa menyewa.	Rencana /Target PNBP, Rekapitulasi Realisasi PNBP, Laporan Realisasi PNBP, Surat Tagihan atas Pemanfaatan, Bukti Pembayaran atas Pemanfaatan.
UM.03.05	Distribusi Barang Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pendistribusian BMN kepada unit-unit kerja (BAST BMN).	Surat Permintaan/Bon Permintaan, Rekapitulasi Distribusi, Berita Acara Pinjam Pakai, Daftar Inventaris Ruangan/Daftar Inventaris Lainnya, Kartu Inventaris Barang
UM.03.06	Pengelolaan Gudang (nota penyampaian dan daftar barang rusak) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan daftar barang rusak yang didalamnya terdapat berkas form penarikan Barang Milik Negara	Pengelolaan Gudang (nota penyampaian dan daftar barang rusak)
UM.04	Pengamanan Aset Tanah dan Gedung Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamanan Sertifikat Tanah dan Gedung, Bukti penilaian tanah dan gedung	Sertifikat Tanah dan Gedung, Bukti penilaian tanah dan gedung
UM.05	Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan gedung berupa laporan pengelola gedung maupun notulen	Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung
UM.06	Penyediaan Ruang Rapat Naskah-naskah yang berkaitan dengan permohonan peminjaman ruang rapat serta jadwalnya	Penyediaan Ruang Rapat
UM.07	Pelayanan Jasa Listrik, Telepon dan Air Naskah-naskah yang berkaitan dengan tagihan atas pemakaian listrik, telepon, air serta bukti pembayarannya	Pelayanan Jasa Listrik, Telepon dan Air

UM.08	Penyediaan Konsumsi Rapat dan Akomodasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan Konsumsi rapat serta akomodasi berupa surat permohonan konsumsi, undangan rapat, absensi hadir, serta kwitansi pembayaran	Penyediaan Konsumsi Rapat dan Akomodasi
UM.09	Penggunaan Kendaraan Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan penggunaan Bahan bakar, perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas, peminjaman kendaraan dan laporan kerusakan kendaraan dinas.	laporan penggunaan Bahan bakar, perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas, peminjaman kendaraan dan laporan kerusakan kendaraan dinas.
UM.10	Layanan Keamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pengamanan termasuk parkir dan penerimaan tamu	Buku formulir tamu, kartu parkir, kartu akses
UM.11	Layanan Rumah Tangga Lainnya (ID Card, infocus) Naskah-naskah yang berkaitan dengan peminjaman peralatan seperti infocus atau laptop, serta arsip permohonan pembuatan ID Card dan berita acara serah terimanya	Layanan Rumah Tangga Lainnya (ID Card, infocus)
UM.12	Layanan Pakaian Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan pakaian dinas yang didalamnya terdapat berkas ukuran pegawai.	Daftar ukuran pakaian dinas pegawai
TU. TATA USAHA		
TU.01	Administrasi Persuratan	
TU.01.01	Buku agenda (analog atau digital) surat masuk dan surat keluar Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengagendaan surat masuk dan surat keluar	Buku Agenda surat

TU.01.02	Buku ekspedisi/tanda terima surat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi persuratan	Buku Ekspedisi
TU.02	Pengelolaan Arsip Dinamis	
TU.02.01	Penyusunan Sistem Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sistem kearsipan dinamis meliputi petunjuk pelaksanaan kearsipan dan persetujuan JRA	SOP, Peraturan Menteri, SK
TU.02.02	Pembinaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kearsipan dinamis meliputi bimbingan teknis kearsipan, apresiasi/sosialisasi/ penyuluhan, supervisi kearsipan, penilaian jabatan fungsional arsiparis, lomba tertib arsip.	Materi Pembinaan dsb
TU.02.03	Monitoring Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring pengelolaan arsip dinamis di lingkungan unit kerja kementerian BUMN.	Laporan Hasil Monitoring
TU.03	Pengelolaan Arsip Inaktif	
TU.03.01	Penataan, Penyimpanan, Pemeliharaan dan Pengolahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan arsip inaktif mulai dari penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan.	Daftar arsip inaktif
TU.03.02	Peminjaman Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peminjaman arsip inaktif di record center	Buku peminjaman/ formulir peminjaman
TU.04	Penyusutan Arsip	

TU.04.01	Pemindahan Arsip Inaktif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip	Berita acara pemindahan dan daftar arsip yang dipindahkan
TU.04.02	Pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip	daftar arsip usul musnah, berita acara pemusnahan, SK tim pemusnahan arsip, rekomendasi/pertimbangan pemusnahan arsip, dan surat keputusan pemusnahan.
TU.04.03	Penyerahan Arsip Statis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip	Daftar arsip yang diserahkan, berita acara serah terima arsip
TU.05	Perpustakaan dan Dokumentasi	
TU.05.01	Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengada koleksi dan pengolahan bahan pustaka perpustakaan Kementerian BUMN	Buku Induk Koleksi, Daftar buku dalam pemesanan, Daftar buku dan permintaan, Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah, Lembar kerja pengolahan shelf list/ Jajaran Kartu Utama (master list), Daftar tambahan Buku (Assesion list).
TU.05.02	Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi Data Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan jasa dan informasi data yang diberikan perpustakaan Kementerian BUMN	Daftar tamu/peminjam, buku peminjaman, kartu peminjaman dan inventaris buku, data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka dan pemeliharaan, Bedah buku.
TU.05.03	Pemeliharaan Bahan Pustaka Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan bahan pustaka di lingkungan Kementerian BUMN	Laporan kondisi bahan pustaka dan repografi bahan pustaka

TU.05.04	Pembinaan Perpustakaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan perpustakaan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pengembangan SDM, pengembangan sarana dan prasarana, kerjasama dan jaringan perpustakaan, pengembangan minat baca.	Laporan kegiatan pembinaan
KU.KEUANGAN		
KU.01	Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan dari Kementerian Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Internal Kementerian BUMN terkait Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	Kebijakan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Keuangan Negara, Surat dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
KU.02	Pendapatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Realisasi Pendapatan	Surat Setoran Pajak (SSP) dan Bukti Setornya, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Setornya, Surat Setor Bea dan Cukai (SSBC), Bukti setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengembalian Belanja, Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank dsb.
KU.03	Belanja/Pengeluaran Anggaran	

KU.03.01	Dokumen Pembayaran Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pengeluaran baik yang berupa petunjuk pelaksanaan/mechanisme pengelolaan DIPA APBN Rutin dan PMN sampai dengan semua berkas pengajuan pencairan dana sampai terbitnya surat perintah pencairan dana (SP2D)	Pengajuan kebutuhan penarikan kas, bukti bukti tagihan dari pihak ketiga, surat permintaan pembayaran (SPP) LS , surat perintah membayar (SPM) LS, surat perintah pencairan dana (SP2D) LS Pencairan atas DIPA Penyertaan Modal Negara (PMN)
KU.03.02	Uang Persediaan (UP)/Tambahan UP Arsip yang berkaitan dengan belanja yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran menggunakan uang persediaan yang dikelolanya	Bukti bukti tagihan dari pihak ketiga, surat permintaan pembayaran (SPP) GU, surat perintah membayar (SPM) GU, surat perintah pencairan dana (SP2D) GU
KU.03.03	Pembukuan Perbendaharaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembukuan Bendahara Pengeluaran	Pembukuan Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara, Buku Kas Umum, Tunjangan Kinerja, Bukti Potong/SPT (PPh 21, PPh 22, PPh 23)
KU.03.04	Dokumen Akuntansi Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pencatatan transaksi penggunaan anggaran	Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium Kartu Gaji Bukti Setor Iuran/Kontribusi Pemerintah RI kepada Badan/Organisasi Internasional Berita Acara Pemeriksaan Kas Kas/Register Penutupan Kas Arsip Data Komputer (ADK) Berita Acara Rekonsiliasi Antara Satuan Kerja dan KPPN
KU.03.05	Laporan Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Kementerian BUMN.	Laporan Keuangan Realisasi APBN (BA. 041) dan Laporan Keuangan PMN (BA. 999.03) terdiri dari : Neraca Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
KU.04	Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara	

KU.04.01	Tuntutan Perbendaharaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tuntutan atas pengelola perbendaharaan	Tuntutan Perbendaharaan
KU.04.02	Tuntutan Ganti Rugi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengenaan tuntutan ganti rugi	Tuntutan Ganti Rugi
KU.05	Laporan Monitoring dan Evaluasi anggaran Arsip yang berkaitan dengan kegiatan laporan monitoring dan evaluasi anggaran	Laporan monitoring dan evaluasi
HM. HUBUNGAN MASYARAKAT		
HM.01	Hubungan dengan media massa Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerbitan artikel, bulletin, <i>press conferences</i> , dokumentasi audiovisual, pembaruan informasi website, media social dan kliping.	Artikel, bulletin, press conferences, dokumentasi audiovisual, pembaruan informasi website, media social dan kliping.
HM.02	Pameran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pameran, festival, sayembara dsb	Laporan pelaksanaan pameran.
HM.03	Hubungan antar Lembaga dan Masyarakat	
HM.03.01	Hubungan dengan DPR/DPD/MPR Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat pimpinan dengan DPR/DPD/MPR baik Hearing/Rapat Kerja/Koordinasi DPR	Undangan, Surat Dinas, Daftar Pertanyaan DPR, Bahan presentasi/Jawaban atas pertanyaan DPR.

HM.03.02	Kunjungan Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kunjungan kerja DPR bersama pimpinan.	Laporan Kunjungan Kerja.
HM.03.03	Hubungan Dengan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar instansi baik pusat maupun daerah	Surat surat yang terkait dengan pelaksanaan
HM.03.04	Hubungan dengan organisasi sosial /LSM Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan organisasi kemasyarakatan	Surat surat yang terkait dengan pelaksanaan
HM.03.05	Hubungan dengan BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga dengan BUMN	Surat surat yang terkait dengan pelaksanaan
HM.03.06	Hubungan dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan Swasta Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan Swasta	Surat surat yang terkait dengan pelaksanaan
HM.03.07	Hubungan antar Negara, Organisasi Internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan Lembaga dengan Negara lain dan organisasi internasional	Surat surat yang terkait dengan pelaksanaan
HM.04	Pemenuhan Informasi publik/PPID Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemenuhan informasi publik	Surat/Data
HM.05	Pengaduan / Aspirasi Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan unjuk rasa, pengaduan masyarakat dan persepsi publik	Surat/Data
HM.06	Keprotokolan	

HM.06.01	Penyelenggaraan Acara Kedinasan Naskah-naskah yang berkaitan kegiatan protokoler acara kedinasan	Penyelenggaraan acara kedinasan
HM.06.02	Agenda Kegiatan Pimpinan Lembaga Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadwalan dan pelaksanaan agenda pimpinan.	Agenda Kegiatan Pimpinan Lembaga
HM.06.03	Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri Arsip yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri pimpinan lembaga/instansi atau pejabat lainnya	Undangan, Lporan, Daftar Hadir
HM.06.04	Upacara dan Acara Kementerian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial menteri lainnya	Undangan , Daftar Hadir, Berita Acara, foto dsb.
HM.06.05	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan perjalanan dinas dalam dan luar negeri pimpinan.	Tiket, Paspor, dan Visa.
HK. HUKUM		
HK.01	Program Legislasi Lembaga/Instansi Naskah-naskah yang terkait dengan penerbitan peraturan perundang-undangan	Usulan program legislasi dari Kementerian BUMN
HK.02	Produk Hukum	
HK.02.01	Undang-undang Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang.	Kajian, Naskah Akademik, Rancangan Undang-undang, Keputusan Pembentukan PAK, Undangan dan Risalah/Transkrip Rapat Pembahasan (Internal, Panitia Antar Kementerian, Harmonisasi, DPR), sampai diundangkan dan permintaan salinan

HK.02.02	Peraturan Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan pemerintah.	Kajian Rancangan Peraturan Pemerintah, Keputusan Pembentukan PAK, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan (Internal, Panitia Antar Kementerian, Harmonisasi), sampai ditetapkan Peraturan Pemerintah dan permintaan salinan
HK.02.03	Peraturan Presiden Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan praturan presiden.	Kajian, Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Pembentukan PAK, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan (Internal, Panitia Antar Kementerian, Harmonisasi), sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden dan permintaan salinan
HK.02.04	Peraturan Presiden Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan praturan presiden.	Kajian, Keputusan Pembentukan TIM, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan (Internal Konseptor, Antar Unit, dengan BUMN), sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri BUMN dan permintaan salinan
HK.02.05	Keputusan Presiden Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan Keputusan Presiden	Kajian, Nota Dinas dan Surat Pengusulan, Rancangan Keputusan Presiden, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan, Keputusan Presiden dan permintaan salinan
HK.02.06	Keputusan Menteri BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Keputusan Menteri BUMN.	Kajian, Nota Dinas dan Surat Pengusulan, Rancangan Keputusan Menteri BUMN, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan, Keputusan Menteri BUMN dan permintaan salinan
HK.02.07	Instruksi Presiden Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Instruksi Presiden.	Kajian, Nota Dinas dan Surat Pengusulan, Rancangan Instruksi Presiden, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan, Instruksi Presiden dan permintaan salinan
HK.02.08	Instruksi Menteri Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Instruksi Menteri	Kajian, Nota Dinas dan Surat Pengusulan, Rancangan Instruksi Menteri BUMN, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan, Instruksi Menteri BUMN dan permintaan salinan
HK.02.09	Surat Edaran Presiden Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Edaran Presiden Republik Indonesia dan permintaan salinan	Surat Edaran Presiden Republik Indonesia.

HK.02.10	Surat Edaran Menteri BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Edaran Menteri BUMN	Kajian, Nota Dinas Pengusulan, Konsep Surat Edaran, Surat Edaran.
HK.02.11	Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding / Kontrak / Perjanjian Kerjasama Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana perjanjian kerjasama	Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding / Kontrak / Perjanjian Kerjasama
HK.02.12	Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan Salinan Peraturan, Nota Dinas dan Surat Laporan kepada JDIH Pusat termasuk peraturan perundang undangan yang dicipta dari instansi lain	Data Jaringan dokumentasi informasi hukum
HK.02.13	Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan Salinan Peraturan, Nota Dinas dan Surat Laporan kepada JDIH Pusat termasuk peraturan perundang undangan yang dicipta dari instansi lain	Keputusan/Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN
HK.03	Bantuan Hukum	
HK.03.01	Perkara Perdata Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penanganan perkara perdata di lembaga peradilan umum, dimulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat peninjauan kembali	Relas, Surat Kuasa Khusus Mewakili Menteri, Akta Perdamaian Dalam Sidang, Gugatan, Jawaban Gugatan, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan Putusan Pengadilan Negeri, Banding, Kontra Memori Banding, Putusan Pengadilan Tinggi, Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Putusan Kasasi, Peninjauan Kembali, Memori PK, Kontra Memori PK, Putusan PK
HK.03.02	Perkara Pidana/Pendampingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pendampingan perkara pidana yang melibatkan pegawai atau pejabat di Kementerian BUMN di tingkat Penvidikan	(BAP Penyitaan Dokumen, Surat Penggilan Saksi)

HK.03.03	Perkara Tata Usaha Negara/TUN Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penanganan perkara perdata di lembaga Tata Usaha Negara (TUN), dimulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat peninjauan kembali.	Relas, Surat Kuasa Khusus Mewakili Menteri, Akta Perdamaian Dalam Sidang, Gugatan, Jawaban Gugatan, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan Putusan Pengadilan TUN, Banding, Kontra Memori Banding, Putusan Pengadilan Tinggi TUN, Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Putusan Kasasi, Peninjauan Kembali, Memori PK, Kontra Memori PK, Putusan PK
HK.03.04	Perkara Arbitrase Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penanganan perkara yang bersifat khusus di luar Pengadilan	Berkas Perkara
HK.03.05	Perkara Pengadilan Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penanganan perkara yang bersifat khusus, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan terkait yang mengaturnya	Berkas Perkara Pengadilan Khusus
HK.03.06	Keterangan Ahli Arsip yang berkaitan dengan pendampingan dalam rangka pemberian keterangan ahli dalam perkara pidana di tingkat peradilan.	Surat Panggilan Pemberian Keterangan Ahli, BAP Keterangan Ahli di Kepolisian/Kejaksaan/KPK
HK.03.07	Dukungan Hukum Arsip yang berkaitan dengan dukungan hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh BUMN.	Surat permohonan dukungan hukum dari BUMN, dan surat tanggapan/dukungan hukum dari Kementerian BUMN
HK.04	Penyuluhan hukum dan Pembinaan Kesadaran Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi terkait atas hal-hal mengenai BUMN, khususnya yang terkait dengan penanganan hukum baik di dalam proses perdata, pidana, Tata Usaha Negara (TUN), dan sebagainya.	notulensi, bahan seminar/sosialisasi

HK.05	Kebijakan umum Anggaran Dasar BUMN dan Perubahannya Naskah-naskah yang berkaitan dengan Anggaran Dasar BUMN seperti Anggaran Dasar (AD) BUMN dalam bentuk AD yang di notarilkan (Persero), Peraturan Pemerintah (PP) tentang pendirian BUMN (Perum), Perubahan AD BUMN	Nota, Konsep dan Penetapan Kebijakan Uum Anggaran Dasar
IA. INTERNAL AUDIT (INSPEKTORAT)		
IA.01	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Arsip yang terkait dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
IA.02	Pelaksanaan Pengawasan	
IA.02.01	Laporan Hasil Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Audit (audit kinerja Kementerian, audit dengan tujuan tertentu), Laporan Hasil Review (review laporan keuangan Kementerian BUMN, reuik RKAKL, reuik RKA BUN), Laporan Evaluasi (evaluasi sistem AKIP-SAKIP, evaluasi LKIP Eselon I, evaluasi penerapan SPIP), Monitoring dan Asistensi (LHPP BPK, LHP Inspektorat/UPG dll), Laporan Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. yang memerlukan tindak lanjut (TL)	Laporan Hasil Pengawasan

IA.02.02	<p>Laporan Hasil Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan berupa Laporan Hasil Audit (audit kinerja Kementerian, audit dengan tujuan tertentu), Laporan Hasil Review (review laporan keuangan Kementerian BUMN, revidi RKAKL, revidi RKA BUN), Laporan Evaluasi (evaluasi sistem AKIP-SAKIP, evaluasi LKIP Eselon I, evaluasi penerapan SPIP), Monitoring dan Asistensi (LHPP BPK, LHP Inspektorat/UPG dll), Laporan Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)</p>	Laporan Hasil Pengawasan
IA.02.03	<p>Audit Investigasi yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut</p>	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI)
IA.02.04	<p>Monitoring dan Asistensi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Asistensi</p>	Monitoring dan Asistensi (LHPP BPK, LHP Inspektorat/UPG dll)
IA.02.05	<p>Laporan Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan</p>	Laporan Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

IA.03	Pengawasan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (termasuk Whistle Blowing System) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Disposisi/surat tugas menteri BUMN-Sekretaris Menteri, Kertas Kerja, dan Laporan.	Pengawasan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (termasuk Whistle Blowing System)
TI.TEKNOLOGI INFORMASI		
TI.01	Kebijakan dan Perencanaan TI	
TI.01.01	Master Plan TI Naskah-naskah yang berkaitan dengan Master Plan TI.	Enterprise Architecture, IT Governance dan High Level IT Program Road Map & High Level IT Spending Plan beserta undangan dan risalah rapat, dokumen hasil <u>assessment</u> dan <u>peraturan menteri</u>
TI.01.02	Kebijakan terkait aplikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi kebijakan terkait aplikasi, arsip kebijakan aplikasi berupa prosedur/SOP terhadap aplikasi yang ada di KBUMN, arsip koordinasi penyiapan content (isi) website (portal), arsip koordinasi penyajian content (isi) website (portal), arsip koordinasi pengintegrasian content (isi) website (portal)	Kebijakan terkait aplikasi
TI.01.03	Kebijakan terkait Infrastruktur Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi kebijakan terkait infrastruktur, arsip kebijakan infrastruktur berupa Prosedur/SOP terkait Infrastruktur yang ada di KBUMN, arsip koordinasi pembangunan infrastruktur, arsip koordinasi pengembangan infrastruktur dan arsip koordinasi pemeliharaan infrastruktur	Kebijakan untuk infrastruktur
TI.02	Aplikasi Berbasis Elektronik	

TI.02.01	Pembangunan Aplikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi pembangunan aplikasi	Kesepakatan dengan User terkait pembangunan aplikasi baru, perbaikan atas catatan user, perubahan kebutuhan terhadap aplikasi dan penambahan fitur pada aplikasi dan arsip pembangunan aplikasi
TI.02.02	Pengembangan Aplikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi pembangunan aplikasi dan arsip pengembangan aplikasi	Pengembangan Aplikasi
TI.02.03	Pemeliharaan Aplikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi pemeliharaan aplikasi berupa hasil kesepakatan dengan User terkait dengan pemeliharaan aplikasi	Laporan perbaikan atas catatan user, perubahan kebutuhan terhadap aplikasi dan penambahan fitur pada aplikasi
TI.02.04	Manual Penggunaan Aplikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Petunjuk penggunaan aplikasi oleh User Terkait	Manual Penggunaan Aplikasi
TI.02.05	Pengolahan, perawatan, dan Monitoring Database Naskah-naskah yang berkaitan dengan catatan/log aktivitas monitoring pengelolaan database	Pengolahan, perawatan, dan Monitoring Database
TI.03	Infrastruktur	
TI.03.01	Data Center (Server, Firewall, UPS, AC Presisi, EMS, Vesda) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembangunan Data Center tentang desain data center beserta topologi jaringan, arsip pengembangan data center tentang perkembangan teknologi dan center terbaru, arsip pemeliharaan data center tentang pengecekan dan pemeliharaan perangkat hardware di data center seperti UPS, AC Presisi, EMS dan Vesda serta back up data	Data - data terkait Data Center (Server, Firewall, UPS, AC Presisi, EMS, Vesda)

TI.03.02	Hardware (Komputer, Laptop, Printer, Scanner, Infokus, IP Phone) Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan hardware, serah terima dan distribusi hardware dan pemeliharaan hardware	Data - data terkait Hardware (Komputer, Laptop, Printer, Scanner, Infokus, IP Phone)
TI.03.03	Software (Lisensi, OS, DB, Anti Virus, Software Pendukung) Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan software, serah terima dan distribusi software	Data - data terkait Software (Lisensi, OS, DB, Anti Virus, Software Pendukung)
TI.03.04	Networking (Access Point, Switch, Router) Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan peralatan networking	Data - data terkait Networking (Access Point, Switch, Router)
DR. DATA DAN RISET		
DR.01	Pengumpulan Data berbasis TI Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Kementerian BUMN, meliputi perencanaan kebutuhan data, permintaan kepada pemilik data dan penerimaan data, dengan menggunakan media portal Kementerian BUMN berbasis teknologi informasi	Pengumpulan Data berbasis TI
DR.02	Penyusunan Basis Data dan Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi dimiliki oleh Kementerian BUMN yang telah dikumpulkan sebelumnya, dengan menggunakan media portal Kementerian BUMN berbasis teknologi informasi	Penyusunan Basis Data dan Kinerja

DR.03	Penyajian Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengolahan data dan informasi yang dimiliki oleh Kementerian BUMN dengan menggunakan media portal Kementerian BUMN berbasis teknologi informasi, meliputi kegiatan analisis dan penyajian informasi kepada pimpinan atau stakeholders lain yang membutuhkan	Laporan Analisis dan Penyajian Informasi
DR.04	Knowledge Management Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan manajemen pengetahuan (<i>knowledge management</i>) di lingkungan Kementerian BUMN, meliputi proses perolehan pengetahuan (<i>knowledge acquisition</i>), penyimpanan pengetahuan (<i>knowledge storing</i>), penyebaran pengetahuan (<i>knowledge dissemination</i>), pemanfaatan pengetahuan (<i>knowledge utilization</i>), dan evaluasi pengetahuan (<i>knowledge evaluation</i>)	<i>Knowledge Management</i>
DR.05	Pengembangan Kajian/Riset	
DR.05.01	Makro Ekonomi Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelitian dengan ruang lingkup dan topik yang melibatkan seluruh BUMN, meliputi perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian	Kajian/Riset Makro Ekonomi
DR.05.02	Sektor Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelitian ruang lingkup dan topik yang melibatkan sebagian BUMN berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian, meliputi perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian	Kajian/Riset Sektor Industri

DR.05.03	Riset Internal Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelitian ruang lingkup dan topik yang melibatkan internal Kementerian BUMN, meliputi perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian	Riset Internal
DR.05.04	Pengolahan data riset terkait BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelitian ruang lingkup dan topik yang melibatkan Kementerian BUMN	Riset terkait BUMN
DR.06.DR	Layanan Penyediaan data dan kerjasama riset. Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan penyediaan data dan kerjasama riset yang melibatkan stakeholder	Data, Korespondensi
SUBSTANTIF		
PB. PEMBINAAN BUMN		
PB.01	Anggaran Dasar BUMN dan Perubahannya Naskah-naskah yang berkaitan dengan Anggaran Dasar BUMN yang berbentuk Persero dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pendirian BUMN Perum beserta perubahannya	Anggaran Dasar, Peraturan Pemerintah Pendirian Perum
PB.02	Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemilik Modal dalam memberikan pengesahan atas RJPP BUMN mulai dari penyampaian sampai dengan diterbitkannya pengesahan RJPP meliputi:	-Surat penyampaian Usulan RJPP dari BUMN, beserta Buku RJPP dan Tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, -Undangan, notulen dan daftar hadir rapat pembahasan -Bahan presentasi Direksi -Nota Dinas laporan dan analisis usulan RJPP -Surat pengesahan RJPP

PB.03	<p>Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengusulan, pemrosesan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN antara lain meliputi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dari Direksi BUMN beserta draft usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Tanggapan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas - Undangan, daftar hadir dan Notulen Rapat pembahasan - Nota Dinas laporan dan analisis usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) - Surat Kuasa Menteri kepada Asdep Teknis atau Surat Kuasa Deputi kepada Pejabat Lainnya - Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan - Undangan RUPS, Usulan Agenda RUPS dan Daftar Hadir RUPS - Bahan Presentasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas - Surat kuasa anggota direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas apabila tidak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) - Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Surat Menteri BUMN selaku Pemilik Modal
PB.04	<p>Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengusulan, pemrosesan dan pengesahan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN antara lain meliputi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat penyampaian Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dari BUMN beserta buku Draft Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas -Undangan, Notulen dan Daftar Hadir rapat pembahasan - Nota Dinas laporan dan analisis usulan revisi RKAP - Surat Menteri/Deputi tentang Persetujuan Revisi RKAP

PB.05	<p>Reviu Laporan manajemen pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi kinerja BUMN atas pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada tahun berjalan secara berkala meliputi reviu atas laporan manajemen Triwulan I, laporan manajemen Semester I, laporan triwulan III disertai penyampaian tanggapan tertulis hasil reviu kepada manajemen serta reviu atas laporan manajemen unaudited dan laporan manajemen audited</p>	<p>Reviu Laporan manajemen pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN</p>
PB.06	<p>Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan Laporan Tahunan BUMN</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan Pengesahan Laporan Tahunan dan Persetujuan Laporan Keuangan BUMN oleh RUPS/Menteri antara lain meliputi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat penyampaian Laporan tahunan-audited dari BUMN, buku Laporan Tahunan-audited termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, laporan Hasil Audit Independen serta Tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas - Nota Dinas laporan dan analisis usulan persetujuan dan pengesahan laporan tahunan serta agenda terkait lainnya -Surat Kuasa Menteri BUMN dan persetujuan mengenai hal-hal yang perlu keputusan RUPS untuk masing-masing agenda RUPS serta surat Kuasa Pemegang Saham lainnya - Undangan dan Daftar Hadir RUPS - Bahan Presentasi Direksi dan Dewan Komisaris - Surat kuasa anggota direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas apabila tidak menghadiri RUPS - Risalah RUPS/Surat Menteri selaku Pemilik Modal

PB.07	Monitoring dan Evaluasi Berkala Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan program kerja BUMN baik melalui kunjungan lapangan maupun berdasarkan laporan tertulis misalnya monitoring pelaksanaan investasi BUMN, pencapaian kinerja cabang/unit, Pelaksanaan PKBL, atau pelaksanaan GCG.	Monitoring dan Evaluasi Berkala
PB.08	Aksi Koorporasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala tindakan perusahaan yang perlu mendapat persetujuan/pengesahan RUPS/Menteri BUMN atau perlu dilaporkan kepada RUPS/Menteri BUMN termasuk Legal opinion bagi Menteri dan Deputy terkait aksi korporasi antara lain meliputi:	<ul style="list-style-type: none"> - Pendayagunaan aset (Sewa, KSO, BOT, BTO, BOWT) - Pemindahtanganan - Penghapusbukuan aset - Penarikan Kredit dan pengagunan aset - Avalist dan Corporate Guarante - Pemberian Pinjaman ke anak Perusahaan - Pendirian Anak Perusahaan dan/atau penyertaan modal pada perusahaan patungan - Penambahan atau pengurangan Penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan - Likuidasi anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan - Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan - Persetujuan Penunjukan Wakil Perseroan ke Anak Perusahaan/Usaha - Patungan - Blue Print Organisasi Perseroan - Logo Perseroan - Pembentukan Yayasan, Organisasi dan/atau perkumpulan - Pengusulan wakil perseroan untuk menjadi salah anggota Direksi dan

PB.09	Likuidasi BUMN/Perubahan status bentuk hukum BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan likuidasi BUMN maupun perubahan status bentuk hukum BUMN antara lain:	- Korespondensi, Nota dan Surat Persetujuan Menteri - Homologasi
PB.10	Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi BUMN	
PB.10.01	Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Direksi BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengusulan calon Direksi BUMN serta pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan Calon Direksi BUMN antara lain meliputi:	- CV Bakal Calon Direksi BUMN - Hasil assesment oleh lembaga profesional '- Surat lamaran/ Pernyataan minat Bakal Calon Direksi BUMN (sumber eksternal) '- Surat Rekomendasi/Usulan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris - Company Profile '- Surat Pernyataan Bakal Calon Direksi BUMN - Hasil Wawancara/ Evaluasi Tim UKK '- <u>Berita Acara Pelaksanaan UKK</u>
PB.10.02	Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi BUMN antara lain meliputi:	- Nota dinas usulan pengangkatan Direksi - Surat keputusan Menteri BUMN tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi BUMN dan salinannya serta Surat penyampaian salinannya - Kontrak Manajemen/Surat Pernyataan Direksi - Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Direksi - Undangan dan Berita Acara Rencana Pemberitahuan Pemberhentian untuk Direksi yang diberhentikan sebelum habis masa jabatan
PB.11	Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN	

PB.11.01	<p>Penilaian Bakal Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengusulan calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta pelaksanaan penilaian Bakal Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN antara lain meliputi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CV Bakal Calon Dekom/Dewas BUMN - Hasil assesment oleh lembaga profesional - Surat Rekomendasi/Usulan Kementerian/Lembaga/ Instansi - Hasil Penilaian Pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain - Hasil Penilaian Pemenuhan Persyaratan Materiil - Laporan Hasil Penilaian Bakal Calon Dekom/Dewas BUMN
PB.11.02	<p>Pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN antara lain meliputi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nota dinas usulan pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas - Surat keputusan Menteri BUMN tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan salinannya serta Surat penyampaian salinannya - Kontrak Manajemen/Surat Pernyataan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas - Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas - Undangan dan Berita Acara Rencana Pemberitahuan Pemberhentian untuk Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang diberhentikan sebelum habis masa jabatan
PB.12	<p>Pergantian Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan BUMN</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN antara lain meliputi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat usulan penggantian atau pengangkatan Direksi /Dewan Komisaris anak perusahaan - Surat rekomendasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN - Nota Dinas dan Surat persetujuan Menteri BUMN

PB.13	Monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas/Pejabat BUMN	Monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN BUMN
PB.14	Master Plan TI BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan dan Master Plan TI BUMN	Master Plan TI BUMN
UV. PENGEMBANGAN USAHA DAN PRIVATISASI BUMN		
UV.01	Pengembangan Usaha	
UV.01.01	Penyusunan Aspirasi Pemegang Saham Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan aspirasi pemegang saham berupa kajian, masukan dari ke deputian teknis dan narasumber, persetujuan penetapan dan sosialisasi	Aspirasi Pemegang Saham
UV.01.02	Road Map Pembinaan BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana pengelolaan BUMN di masa yang akan datang termasuk di dalamnya rencana holding sektoral dan sejenisnya, kajian, sosialisasi, evaluasi dan surat penetapan	Road Map Pembinaan BUMN
UV.01.03	Evaluasi Road Map Pembinaan BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap Road Map pembinaan BUMN	Laporan hasil evaluasi

UV.01.04	Kebijakan Deviden Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala bentuk proses pengusulan, penyusunan, kebijakan dan persetujuan penetapan dividen	Kebijakan Deviden
UV.02	Privatisasi BUMN Program Privatisasi Tahunan (PTP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses privatisasi dari mulai pengajuan privatisasi oleh BUMN, Kedeputan teknis atau penugasan oleh pemerintah hingga mendapat persetujuan dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Komite Privatisasi dan DPR RI	Program Privatisasi Tahunan (PTP)
UV.02.01		
UV.02.02	Pelaksanaan Privatisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan privatisasi yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan yang kegiatannya antara lain seleksi para profesi penunjang, proses terbitnya PP pelaksanaan privatisasi hingga pelaporan pelaksanaan privatisasi	Pelaksanaan Privatisasi
UV.03	Sinergi BUMN dan Anak Perusahaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan seluruh proses kegiatan sinergi BUMN, anak perusahaan BUMN, cucu BUMN dan lain-lain dari mulai identifikasi adanya potensi sinergi BUMN, <i>action</i> dari rencana sinergi BUMN dan pelaporan pelaksanaan sinergi BUMN	Kebijakan Sinergi BUMN dan Anak Perusahaan
UV.04	Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)	

UV.04.01	Pengusulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala bentuk proses usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari BUMN ke kedeputan teknis, Kementerian BUMN ke Kementerian Keuangan hingga persetujuan dari DPR RI	Pengusulan Penyertaan Modal Negara (PMN)
UV.04.02	Penerbitan PP tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala proses penerbitan PP antara lain kajian bersama, pembahasan antar instansi hingga pembahasan RPP sampai dengan terbitnya PP	Penerbitan PP tentang Penyertaan Modal Negara (PMN)
UV.04.03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN)
UV.05	Penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala bentuk penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) kepada para pihak baik BUMN dan Kementerian terkait	Rekomendasi Penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

UV.06	Penyelesaian Rekening Dana Investasi (RDI)/ Subsidiary Loan Agreement (SLA) Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala bentuk penyelesaian Rekening Dana Investasi (RDI) Subsidiary Loan Agreement (SLA) berupa pengusulan dari BUMN ke ke deputian teknis, penetapan dan laporan akhir kepada Menteri BUMN	Rekomendasi Penyelesaian Rekening Dana Investasi (RDI)/ Subsidiary Loan Agreement (SLA)
UV.07	Public Service Obligation (PSO) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendataan Public Service Obligation (PSO)	persetujuan/kebijakan PSO
RP.Restrukturisasi dan Kebijakan Strategis Pengelolaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas.		
RP.01	Restrukturisasi Sektoral BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Restrukturisasi Sektoral BUMN berupa konsep kajian bersama, pembahasan kajian bersama, penyampaian rencana restrukturisasi kepada Menteri Keuangan dan atau Presiden, pembahasan kajian bersama dan RPP dengan Kementerian terkait, Peraturan Pemerintah terkait, Pelaksanaan restrukturisasi sektoral/korporasi.	Kajian, Surat, Risalah Rapat
RP.02	Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas	

RP.02.01	Bahan aspirasi Kepentingan Pemerintah untuk BUMN Minoritas Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan aspirasi kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham pada perusahaan dengan kepemilikan minoritas, antara lain: Surat yang ditujukan ke Direksi/ Dekom sebagai wakil pemerintah dan/ atau bukan sebagai wakil pemerintah	Surat, Nota
RP.02.02	Analisis Laporan Kinerja Perusahaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas, antara lain: laporan tahunan perusahaan, laporan manajemen (Audited), dan laporan triwulan I, II, dan III	Laporan Analisis Kinerja
RP.02.03	Analisis, Monitoring, dan evaluasi atas aksi korporasi strategis Naskah-naskah yang berkaitan dengan bahan analisis, monitoring dan evaluasi atas aksi korporasi strategis, isu-isu strategis perusahaan, analisis bahan sebagai wakil pemerintah dalam public expose perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas	Laporan Analisis dan monitoring/ evaluasi
RP.02.04	Data kinerja perusahaan sistem informasi Kementerian Naskah-naskah yang berkaitan dengan update data kinerja perusahaan dengan kepemilikan negara	Data

RP.02.05	Pembinaan pengelolaan portofolio kepemilikan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan bahan analisis isu pembinaan perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas	Surat, Nota, Laporan
RP.02.06	Laporan Keuangan Kombinasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan kombinasi seluruh BUMN	Laporan Keuangan Kombinasi
MB. Manajemen SDM Eksekutif BUMN		
MB.01	Data Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN	
MB.01.01	Data Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan perubahan susunan keanggotaan Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang akan habis masa jabatan atau data lainnya.	Data Direksi dan Dewan Komisaris
MB.01.02	Data Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan perubahan susunan keanggotaan Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN yang akan habis masa jabatan atau data lainnya.	Data Direksi dan Dewan Komisaris

MB.02	Kebijakan Terkait Key Performance Indicator (KPI) Direksi/Dekom/Dewas BUMN Naskah - naskah yang berkaitan dengan penyusunan penetapan kebijakan terkait Key Performance Indicator (KPI) bagi Direksi dan Dekom/Dewas BUMN	Surat, Nota
MB.03	Kebijakan dan koordinasi pengelolaan informasi SDM Eksekutif BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan monitoring atas pemenuhan data portal SDM BUMN	Surat, Nota, Data pengangkatan dan pemberhentian Direksi atau Dekom/Dewas BUMN, dan Nota Dinas/Memo tentang updating dan validasi data portal SDM
MB.04	Pengembangan SDM Eksekutif BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan bahan-bahan perumusan program pengembangan Direksi/Calon Direksi BUMN, bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang kegiatan pengembangan SDM Eksekutif BUMN.	Surat /kebijakan Menteri BUMN tentang pengembangan SDM eksekutif BUMN, Kurikulum pengembangan SDM Eksekutif BUMN, dan Laporan Pelaksanaan Program Pengembangan SDM Eksekutif BUMN
MB.05	Kebijakan dan Evaluasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan evaluasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada BUMN	Surat /Kebijakan Menteri BUMN tentang Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada BUMN.

MB.06	Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Good Corporate Governance pada BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan evaluasi penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN	Surat /Kebijakan Menteri BUMN tentang Good Corporate Governance (GCG) dan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)pada seluruh BUMN
MB.07	Kebijakan dan Evaluasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Wajib Lapo BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakandan evaluasi atas kewajiban kepada seluruh Wajib Lapo BUMN untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan KPK	Surat /Kebijakan tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Evaluasi Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada seluruh BUMN
MB.08	Kebijakan dan Evaluasi pelaksanaan Outsourcing BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan evaluasi ketenagakerjaan/outsourcing di BUMN.	Surat/Kebijakan tentang outsourcing BUMN dan Laporan Monitoring Pelaksanaan Surat Edaran/Kebijakan Menteri BUMN tentang outsourcing BUMN
MB.09	Remunerasi Direksi Komisaris dan Dewan Pengawa BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan remunerasi Direksi Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN	SK/Penetapan Remunerasi, Data
MB.10	Assesment Center Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penetapan Assesment Center bagi calon direksi/Dewan Komisaris BUMN/anak perusahaan BUMN	SK/Penetapan Assesment Center
MB.11	Talent BUMN	

MB.11.01	Talent Internal BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan CV/hasil Assesment nama - nama untuk dijadikan bakal calon Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang tidak/belum diproses lebih lanjut menuju tahap uji kelayakan dan kepatutan yang berasal dari internal BUMN	CV dan hasil Assesment
MB.11.02	Talent Eksternal BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan CV/hasil Assesment nama - nama untuk dijadikan bakal calon Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang tidak/belum diproses lebih lanjut menuju tahap uji kelayakan dan kepatutan yang berasal dari eksternal BUMN	CV dan hasil Assesment
SL. TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN		
SL.01	Kebijakan Program TJSL Kementerian BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kegiatan Inisiatif dari KBUMN mengenai kegiatan TJSL/PKBL(Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), seperti Kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri, Siswa Mengenal Nusantara, dan lainnya	-Nota dinas/surat/risalah terkait Kegiatan Inisiatif dari Kementerian BUMN/Pemerintah -Naskah Dinas terkait Pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN tentang TJSL/PKBL
SL.02	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan TJSL Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) meliputi Naskah Dinas terkait Kegiatan Monev TJSL/PKBL, Laporan dan rekomendasi Monev, Pengelolaan dan Analisis Data TJSL/PKBL	-Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Tanggung jawab sosial BUMN -Naskah Dinas terkait Kegiatan Monev TJSL/PKBL -Laporan dan rekomendasi Monev -Pengelolaan dan Analisis Data TJSL/PKBL

SL.03	Data TJSL BUMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan dan realisasi pengelolaan dana TJSL BUMN	Data TJSL BUMN
-------	---	----------------

Aktif	Inaktif	Keterangan	SKKAAD	Hak Akses	Dasar Pertimbangan
1 Tahun setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah Tidak Berlaku	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	2 tahun	Musnah kecuali laporan tahunan Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali LAKIP Kementerian Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah Tidak Berlaku	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah Tidak Berlaku	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah Kecuali Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun, setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun, setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun, setelah diangkat ASN	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun, setelah diangkat ASN	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
-	-	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN
1 tahun, setelah Surat Keputusan (SK) ditetapkan	2 tahun	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN
2 tahun, setelah Petikan SK ditetapkan	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun, setelah tahun anggaran berakhir	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 tahun, setelah tahun anggaran berakhir	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun, setelah pelantikan	2 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN
2 tahun, setelah pelantikan	2 tahun	Musnah kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Musnah kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan
1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah kecuali sertifikat masuk berkas perseorangan	Terbuka	Eselon III	Memiki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN
1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah kecuali Ijazah masuk berkas perseorangan	Terbuka	Eselon III	Memiki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN
1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah kecuali Surat Keterangan Lulus masuk berkas perseorangan	Terbuka	Eselon III	Memiki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN

3 Tahun	2 Tahun	Musnah kecuali laporan hasil asesmen Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN
1 tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun, setelah penilaian ditetapkan	3 tahun	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun, setelah penilaian ditetapkan	3 tahun	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah, kecuali SK Penetapan Angka Kredit masuk berkas perseorangan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah, kecuali BAP dan SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun, setelah memperoleh keputusan tetap	5 tahun	Dinilai kembali, kecuali SK Penetapan masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN
1 tahun, setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun, setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun, setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun, setelah penetapan	-	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Surat Persetujuan dan SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	5 tahun	Musnah kecuali pejabat eselon I Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
Masuk Personal File	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah SK ditetapkan	-	Masuk Berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
3 tahun setelah pelaksanaan	-	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah penetapan	-	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	8 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun	8 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 Tahun	1 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	-	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	-	Permanen sampai pensiun	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun	-	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	-	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	-	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah memperoleh keputusan yang bersifat tetap	2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 Tahun	3 Tahun	Musnah kecuali penugasan untuk Direksi/ Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 Tahun tidak menjabat	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Musnah kecuali Penetapan Informasi Jabatan Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Musnah kecuali Peraturan Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Musnah kecuali Penetapan Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Musnah kecuali Penetapan Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Musnah kecuali Penetapan Kebijakan Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 Tahun	8 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 Tahun	8 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah Perjanjian Berakhir	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 Tahun	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 Tahun setelah Perjanjian Berakhir	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah audit	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
Selama aset Masih Dimiliki	1 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	dinilai kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
Selama masih berlaku	2 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
Selama masih berlaku	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
Selama masih berlaku	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

Selama masih berlaku	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen kecuali fisik arsip musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Musnah kecuali buku induk koleksi Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun	1 Tahun	musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 tahun	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 Tahun setelah KPA tidak menjabat	4 Tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban APBN disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun setelah UU APBN disahkan	5 tahun	Dinilai kembali kecuali Pencairan berkaitan dengan PMN Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah UU APBN disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah UU APBN disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah UU APBN disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah UU APBN disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun setelah tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dilunasi	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Permanen	Terbatas	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun setelah tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dilunasi	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Permanen	Terbatas	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	2 tahun	Musnah Kecuali Dokumentasi Kegiatan Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	HM.03.03
2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali isu strategis Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	
1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	
2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali isu strategis Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	
1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	
2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali isu strategis Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	
1 tahun	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	
1 tahun	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	

1 tahun	2 tahun	Musnah kecuali dokumentasi Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	1 tahun	Musnah kecuali dokumentasi Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	1 tahun	Musnah kecuali dokumentasi Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	1 tahun	Musnah kecuali dokumentasi Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali dokumentasi Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 Tahun	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah diundangkan	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

[illegible]

1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Dinilai kembali kecuali Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 Tahun setelah diperbarui	-	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 Tahun setelah Inkrach	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 Tahun setelah Inkrach	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 Tahun setelah Inkrach	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 Tahun setelah Inkrach	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 Tahun setelah Inkrach	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 Tahun setelah Inkrach	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 Tahun setelah Inkrach	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah tindak lanjut selesai	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah tindak lanjut selesai	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun setelah tindak lanjut selesai	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun setelah tidak dipergunakan	5 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun setelah tidak dikembangkan	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah tidak dikembangkan	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah tidak dikembangkan	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah tidak dikembangkan	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah tidak dikembangkan	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbatas	Penentu Kebijakan , Pelaksanan kebijakan, Penegak Hukum	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah diperbarui	2 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	8 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	8 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah diperbarui	2 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	8 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun Setelah diperbarui	2 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun Setelah diperbarui	2 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali kebijakan Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali kebijakan Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali kebijakan Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali kebijakan Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali kebijakan Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 Tahun	5 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 Tahun	5 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 Tahun setelah pelaksanaan Assesment	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 Tahun setelah pelaksanaan Assesment	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak berdampak apapun bagi kinerja Kementerian BUMN

1 tahun setelah pelaksanaan	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
-----------------------------	---------	--------	---------	------------	--